



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 26 Tahun VII / September 2018

- **Indonesia-Singapore Partners In Asean**
- **Respon TNI Hadapi Pergeseran Geopolitik Kawasan**

**Dr Cho Khong Paparkan
Sky Scenario**



*Kemerdekaan bukan tanda untuk
berhenti berjuang,
tapi tanda untuk berjuang dengan
lebih keras lagi.*



DIRGAHAYU
HUT-RI
17 AGUSTUS 2018

Catatan Redaksi



PELINDUNG AGUS WIDJOJO
PEMBINA BAGUS PURUHITO
PENGARAH MOCHAMMAD IRIAWAN
PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI MINDARTO
REDAKTUR SUGENG SANTOSO
DESAIN GRAFIS
BAMBANG IMAN ARYANTO, YANWAR ABIDIN RAKINDA
KOORDINATOR FOTOGRAFER M. ISDAR
FOTOGRAFER SURYADI, SUYONO
SEKRETARIAT ADLANSYAH M, HERU SEPTOWIDODO,
GATOT, MARDIANA PRIHATINI, YUSNADI, DASWATI,
JEMARI, YATIK WULANDARI
PENULIS ARTIKEL
ENDAH HELIANA, CAHYAQADRI HILDAMONA,
MAGISTA DIAN, NI MADE VIRA

ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110
TELP. (021) 3832108, 3832109
FAX (021)-3451926
EMAIL : humas@lemhannas.go.id
WEBSITE : www.lemhannas.go.id

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA
SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Om Swasti Astu

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Majalah Swantara Edisi ke-26 bulan September 2018, kembali hadir di tengah-tengah para pembaca.

Pada edisi ke-26 ini, redaksi berusaha terus meningkatkan kualitas, baik konten maupun layout agar lebih segar dan mampu memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelembagaan dan memberikan pesan yang sarat makna kepada pembaca. Selain kegiatan kelembagaan, redaksi juga mengangkat kolom inspirasi dari peserta PPRA LVIII Arundati Shinta mengenai “Belajar Tidak Rakus di Asrama Lemhannas dan Hubungannya dengan Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi”.

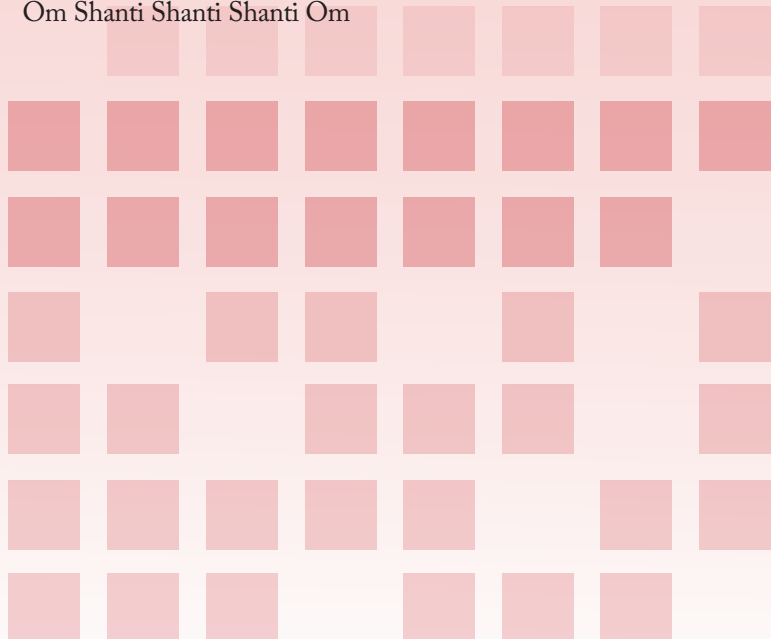
Redaksi menyadari jika penyusunan penerbitan Majalah Swantara edisi kali ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kami tetap mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang akan kami sajikan pada edisi mendatang.

Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 26 kali ini.

Semoga, Majalah Swantara tetap berkesan di hati para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera
Om Shanti Shanti Shanti Om





Salam Ketahanan Nasional

Pada edisi ke-26 September 2018 ini, Majalah Swantara menyoroti kegiatan Program Pendidikan Reguler Angkatan LVIII hingga penutupan program tersebut pada 20 September 2018 yang lalu. Rangkaian kegiatan yang diangkat ke dalam Majalah Swantara antara lain pelaporan SSDN, pelaporan SSLN, serta penutupan PPRA LVII.

Pada pertengahan Agustus 2018 lalu, Dr. Cho Khong, *Chief Political Analyst* dari *Shell International*, berkesempatan memberikan ceramah mengenai *Sky Scenario* yang telah dibangun oleh timnya di *Global Business Environment* di *Shell International*. Skenario tersebut menjadi rute dan referensi dunia yang memungkinkan untuk mencapai tujuan *Paris Agreement*, termasuk *net-zero emissions* dari penggunaan energi hingga 2070.

Selain itu, Lemhannas RI juga terus menjalin relasinya dengan negara-negara sahabat, sebagaimana yang tertuang dalam artikel *“Indonesia-Singapore, Partners in ASEAN”*. Dalam artikel tersebut Keith Tan, *Chief Executive The Singapore Tourism Board’s (STB)* yang memaparkan mengenai potensi ekonomi kawasan Asia Tenggara.

Dalam mewujudkan peran serta fungsinya, Lemhannas RI secara berkelanjutan menyusun berbagai program kegiatan antara lain seperti menyiapkan dan memantapkan kader-kader pemimpin nasional, menghasilkan rekomendasi kajian-kajian isu strategis baik nasional maupun internasional, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kami berharap Majalah Swantara edisi ke-26 yang diterbitkan pada September 2018 ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca dalam merespon kondisi perkembangan politik nasional maupun internasional.

Gubernur Lemhannas RI

Daftar Isi

SEPUTAR KITA



6 Wakil Presiden RI: Pesta Demokrasi Adalah Cara, Bukan Tujuan



8 Lemhannas RI Selenggarakan Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Alumni Taplai dan ToT



20 Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals*



22 Kepala BKP: Indonesia Miliki Potensi Sumber Daya Pangan Besar



34 Dr. Cho Khong Paparkan *Sky Scenario*



36 Laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) PPRA LVII Lemhannas RI

50

INSPIRASI



Arundati Shinta Peserta PPRA 58 Lemhannas 2018: Belajar Tidak Rakus di Asrama Lemhannas dan Hubungannya dengan Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi



10 Kepala BNN::
30 Orang Meninggal
Setiap Hari Akibat
Narkoba



12 Otto Scharmer Berikan
Materi Pada Peserta
Making Indonesia 4.0



14 Alex Nurdin::
Sumatera Selatan
Adalah Daerah *Zero
Conflict*



16 Menteri Bappenas:
Pemerataan Pertumbuhan
Ekonomi di Seluruh
Wilayah Indonesia Bukan
Pekerjaan Mudah



18 Menkominfo:
Ekonomi Masa Depan
adalah *Digital Space*



24 PPRA LVII Laporkan
Hasil SSDN di Empat
Provinsi



28 Lemhannas RI Selenggarakan
Kegiatan Pemantapan
Nilai-Nilai Kebangsaan bagi
Perhimpunan Indonesia
Tionghoa (INTI) Angkatan I



29 Enggartiasto
Lukita: Keterbukaan
Membawa Indonesia
ke Dalam Rantai Pasok
Global



30 Indonesia-Singapore
Partners in ASEAN



32 Airlangga Hartarto:
Sektor Manufaktur
Jadi Ujung Tombak
Perekonomian Indonesia



42 FGD Bahas Antisipasi
Dampak Negatif Aksi
Intoleransi Umat
Beragama



45 Menko KEMARITIMAN Berikan
Kuliah pada Peserta PPRA
LVII dan LVIII



46 Respon TNI Hadapi
Pergeseran Geopolitik
Kawasan



48 PPRA LVII Resmi
Ditutup



49 PPRA LVII Selenggarakan
Seminar Nasional
"Penataan Partai Politik
untuk Memperkuat Sistem
Pemerintahan Presidensial di
Indonesia"



Wakil Presiden RI

Pesta Demokrasi Adalah Cara, Bukan Tujuan

Kuliah Umum Wapres kepada Peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII di Istana Wakil Presiden

Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla berikan kuliah umum pada Peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat (25/6). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., para Tajar, Taji, dan Taprof Lemhannas RI.

A cara diawali oleh laporan dari Gubernur Lemhannas RI. Dalam kesempatan tersebut, dilaporkan bahwa Lemhannas RI pada tahun 2018 ini menjalankan dua kegiatan program pendidikan reguler yaitu PPRA LVII dan PPRA LVIII. Saat ini, PPRA LVII diikuti oleh 100 peserta, dengan komposisi TNI/Polri sebanyak 58 peserta, perwakilan LPNK/Lembaga Tinggi Negara/Jaksa Agung/Partai Politik sebanyak 35 peserta, dan 7 peserta negara sahabat. PPRA LVIII diikuti oleh 100 peserta, dengan komposisi TNI/Polri sebanyak 50 peserta, perwakilan LPNK/Lembaga Tinggi Negara/Jaksa Agung/Partai Politik sebanyak 34 peserta, dan 6 peserta negara sahabat.

Direncanakan PPRA LVII akan melaksanakan kegiatan SSDN ke Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sulawesi Tengah pada 16-19 Juni 2018 nanti, sementara kegiatan SSLN ke Polandia, Hungaria, Rumania, dan Turki pada 6-9 Agustus 2018. Selanjutnya untuk PPRA LVIII akan melaksanakan kegiatan SSDN ke Provinsi Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Gorontalo pada 27-30 Agustus 2018, semenara kegiatan SSLN ke negara Portugal, Perancis, Swedia, dan Spanyol 24-27 September 2018.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta program pendidikan reguler mendapatkan materi dari Wakil Presiden

RI mengenai “Pesta Demokrasi, Pilkada, dan Pemilu”. Mengawali kuliah umum, Jusuf Kalla menceritakan kembali mengenai kondisi pemilu di tahun 1980-an, dimana pada masa tersebut kondisi pemilu sangat sederhana, pemilih hanya dihadapkan dengan memilih satu dari tiga partai, tanpa memilih perwakilan dari masing-masing partai.

“Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia mengalami banyak dinamika, dari liberal, parlementer, dan kemudian dikembalikan ke sistem UUD NRI 1945. Dengan adanya Dekrit Juni 1959, Indonesia kembali ke sistem presidensial. Kemudian dinamika kembali terjadi di tahun 1966, setelah peristiwa G30S, Indonesia kembali ke sistem parlementer. Pada akhirnya, demokrasi yang berkembang pada masa Orde Baru yang mengarah ke otoritarianisme berakhir pada tahun 1998,” kata Jusuf Kalla.

Di hadapan peserta PPRA, pria yang akrab dipanggil JK tersebut mengungkapkan, saat ini sistem yang ada berputar-putar. “BerbedadengandahuludimanaIndonesiamasihmemiliki lembaga tertinggi negara yaitu MPR, saat ini semua lembaga menjadi lembaga tinggi negara, jadi berputar-putar,” kata JK.

“Di Indonesia, pesta demokrasi adalah cara, bukan tujuan. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menjadikan pesta demokrasi sebagai tujuan, untuk kemenangan, demokrasi di Indonesia adalah cara untuk mencapai kesejahteraan. Sementara bagi AS, bila ada negara yang berbeda dengan

“
Demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila sila keempat, yaitu ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’, hal tersebut bermakna bahwa demokrasi merupakan memilih perwakilan dari rakyat

– HM. Jusuf Kalla



Wapres Yakin Pilkada Akan Aman

“Saya meyakini Pilkada di Indonesia akan aman,” kata JK menyinggung banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pilkada di Indonesia. “Pengalaman dari sebelas pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya, Indonesia selalu aman,” kata JK. Tercatat Indonesia telah menyelenggarakan sebanyak sebelas kali pemilu yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. “Satu-satunya konflik yang pernah terjadi hanya pada tahun 1977 saja di bilangan Senen, Jakarta,” kata JK melanjutkan.

Menurut JK, ada lima alasan utama dirinya memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Indonesia akan aman. “Pertama, tidak ada koalisi nasional. Seluruh partai saat ini bercampur-baur, tidak ada poros nasional. Kedua, aturan KPU yang ketat. Ketiga, terjaminnya keamanan nasional. Keempat, rakyat sudah mengetahui banyak karena adanya informasi dari media sosial dan internet. Kelima, partai saat ini sudah nasionalis. Saat ini tidak ada partai yang benar-benar religus, atau yang benar-benar nasionalis. Kita mudah menemukan partai religius yang nasionalis, atau partai nasionalis yang religius,” kata JK.

Terkait dengan adanya protes dan emonstrasi yang terjadi pasca pemilu/pilkada, JK mengajak para peserta program pendidikan reguler dan masyarakat untuk optimis dan positif menyikapi dinamika yang ada. “Saya rasa adalah kewajaran kalau ada protes dan demonstrasi terkait dengan hasil pilkada/pemilu, mungkin hal tersebut akibat adanya one man one vote,” kata JK. Ia juga melanjutkan bahwa konflik yang terjadi di Poso diakibatkan oleh demokrasi yang tiba-tiba, bukan disebabkan oleh agama.

Menurut JK, pemilu di jaman Orde Baru adalah pemilu yang paling sederhana, karena pemilih hanya diminta untuk memilih satu dari tiga

partai. “Pemilu 2019 adalah pemilu yang paling rumit di dunia, karena pemilih diminta memilih lima tingkat, mulai dari DPRD TK I, DPR, DPD, hingga ke presiden, termasuk harus memilih orang (perwakilannya),” kata JK.

Kuliah umum kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Salah satu pertanyaan yaitu dari peserta negara sahabat Australia, Brigjen Justin Roocke. Dalam tanya jawab tersebut, Roocke menanyakan tentang pesta demokrasi di Indonesia. Dia menilai, pihak yang menang dalam pesta demokrasi Indonesia biasanya merupakan sosok yang populer daripada yang berpengalaman.

“Untuk betul-betul membangun watak calon di parpol Indonesia berdasarkan kepada empat konsensus dasar negara, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Menurut Bapak, bagaimana ke depan? Karena cenderung calon (pemimpin) parpol mementingkan diri sendiri dan partai politik di atas kepentingan bangsa dan negara?” ujar Roocke yang disambut dengan tepuk tangan dari para peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII 2018.

Menjawab pertanyaan tersebut, JK mengatakan, terpilihnya calon-calon populer pada pesta demokrasi akibat pemilihan umum secara langsung. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lainnya seperti Amerika Serikat (AS). JK mencontohkan, Donald Trump menang dalam pemilihan umum di AS karena populer.

“Jangan lupa di Amerika, (Donald) Trump terpilih karena dia populer. Namun, di Indonesia ada batasan, yaitu pendidikan, minimum sarjana,” kata JK. JK menegaskan, inti pesta demokrasi di Indonesia adalah pemilihan rakyat. Apalagi, sistem pemilihan umum di Indonesia adalah memilih partai dan memilih orang. “Tentu saja yang pilih bukan nomer satu, tapi nomer tiga, nomer lima, akibatnya yang terpilihnya yang populer, yang bagikan sembako ke daerah-daerah,” ujar JK. (END)



negaranya (dalam hal demokrasi), maka AS menggempur negara tersebut,” kata JK menambahkan.

“Demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila sila keempat, yaitu ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’, hal tersebut bermakna bahwa demokrasi merupakan memilih perwakilan dari rakyat, itulah yang disebut pemilu,” kata JK. Sementara pilkada yang ada saat ini, menurut JK, merupakan evolusi dari adanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Hal tersebut mengakibatkan negara perlu menyelenggarakan pemilu hampir setiap minggu di tahun 2015 yang lalu. “Untuk itu, pemerintah meminta untuk menyelenggarakan Pemilu di satu hari yang sama agar lebih efisien, yaitu hari Rabu 27 Juni 2018 ini, akan tetapi tidak se-efisien yang kami perkirakan,” kata JK.

Lemhannas RI Selenggarakan Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Alumni Taplai dan ToT

Kegiatan dialog wawasan kebangsaan dalam rangka memperkokoh wawasan kebangsaan para alumni, sebagai wujud komitmen alumni yang telah disepakati bersama dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa.

Lemhannas RI menyelenggarakan Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Alumni Taplai dan ToT di Jakarta selama tiga hari pada 3-5 Juli 2018. Dalam kegiatan tersebut Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto menyebutkan bahwa kegiatan dialog akan dilaksanakan selama tiga hari. Kegiatan ceramah yang akan diberikan oleh narasumber diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sistemik, komprehensif, integral dan holistik kepada peserta. "Suatu kehormatan bagi Lemhannas

RI karena dapat memberikan kesempatan kepada para alumni Taplai dan ToT untuk dapat mengikuti kegiatan dialog Wawasan Kebangsaan terkait isu-isu strategis yang berkembang saat ini, seperti maraknya ancaman teroris, narkoba, dan dampak negatif media sosial yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat membuka kegiatan tersebut di Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI (3/7).

Kegiatan tersebut diikuti oleh alumni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan sebanyak 100 peserta yang sebelumnya pernah mengikuti Pemantapan Nilai-

Nilai Kebangsaan di Magelang, Malang, Semarang, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Yogyakarta, Surabaya, DKI Jakarta, Palembang, Makassar, Bengkulu, Kalimantan Utara, Manado, Padang, dan Bandung.

Agus Widjojo juga menjelaskan bahwa kegiatan dialog wawasan kebangsaan tersebut merupakan dialog dalam rangka lebih memperkokoh wawasan kebangsaan para alumni, sebagai wujud komitmen alumni yang telah disepakati bersama dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun



Melalui kegiatan dialog wawasan kebangsaan ini, diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi serta semangat kebangsaan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di era globalisasi, serta berbagai rongrongan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan
 - Agus Widjojo

1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, sebab mencermati dinamika kehidupan nasional dan menyikapi perkembangan lingkungan strategis bangsa Indonesia yang diikuti dengan kemajuan arus informasi dan komunikasi yang begitu deras dan kompleks, begitu juga dengan maraknya isu terorisme, narkoba, hingga berbagai berita hoaks, telah membuka mata hati kita sebagai warga negara untuk senantiasa memperkuat tali persatuan dan kesatuan guna

memperkokoh dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Melalui kegiatan dialog wawasan kebangsaan ini, diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi serta semangat kebangsaan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di era globalisasi, serta berbagai rongrongan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan,” kata Agus Widjojo di hadapan para peserta Dialog Wawasan Kebangsaan.

Rasa kebangsaan serta nasionalisme yang tinggi akan mendorong semangat

untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, adanya dorongan untuk membela kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta mempunyai kesadaran yang tinggi akan segala aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

“Saya berpesan kepada para peserta agar di kesempatan yang singkat ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Manfaatkan kegiatan ini sebagai wadah tukar pikiran dan pengalaman, guna menyatukan dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara,” kata Agus Widjojo. (END)



Kepala BNN:

30 Orang Meninggal Setiap Hari Akibat Narkoba

Kuliah Umum Kepala BNN Kepada Peserta PPRA LVIII

Pada dasarnya trend perkembangan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2017 turun, akan tetapi jumlah tersebut tetap tinggi, ada sekitar 3,3 juta jiwa penyalah guna narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional, Irjen Pol Drs. Heru Winarko, S.H. memberikan kuliah kepada peserta PPRA LVIII mengenai “Indonesia Darurat Narkoba” di Gedung Pancagatra Lt. III, Lemhannas RI (6/4).

Hal tersebut ia katakan karena tingginya korban akibat narkoba di Indonesia. Saat ini daya rusak narkoba lebih serius dibandingkan korupsi dan terorisme, karena narkoba merusak otak. “Pecandu narkoba itu kronis dan kambuhan, selain itu Indonesia juga merupakan potensi pasar yang besar. Saat ini penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa merupakan pasar potensial untuk narkoba. Penyalah guna narkoba di Indonesia sudah mencapai 4 juta orang,” kata Heru Winarko.

Di hadapan para peserta PPRA

LVIII, Heru juga memaparkan wilayah sebaran yang telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menasar kalangan anak-anak (regenarsi pangsa pasar). Dalam aspek jalur masuk, jalur masuk narkoba di Indonesia terutama melalui jalur laut (wilayah perairan) dan pelabuhan tidak resmi (jalur tikus). Jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia yaitu dari Afrika Barat, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, dan Eropa. Salah satu yang diwaspadai, menurut Heru Winarko, adalah masih tingginya peredaran narkoba di lapas. “Saat ini, para narapidana kasus narkoba masih mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara,” kata Heru Winarko melanjutkan.

Dalam kesempatan tersebut, BNN mendeteksi bahwa terdapat empat jalur penyelundupan narkoba,

yaitu jalur meth, jalur MDMA (metilendioksimetamfetamina/ekstasi), jalur ganja, dan jalur NPS (*New Psychoactive Substances*). Terdapat tiga jalur kawasan yang perlu diwaspadai, yaitu Kawasan Golden Crescent, Kawasan Golden Triangle, dan Kawasan Aceh.

Kawasan Golden Triangle merupakan suatu kawasan di Asia Tenggara yang terletak di perbatasan tiga negara, yakni Thailand, Laos, dan Myanmar. Kawasan tersebut memiliki luas sekitar 950ribu km² yang dikelilingi oleh pegunungan serta dibatasi oleh aliran Sungai Mekong. Kawasan ini mulai dikenal sebagai penghasil narkotika, khususnya opium sejak tahun 1950-an, hal ini karena kawasan Golden Triangle bersama kawasan Golden Crescent menjadi produsen opium yang



dok.humas/ri

memasok keperluan di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri, terdapat jalur penyelundupan yang rawan yaitu melalui Selat Malaka. "Tahun 2017 lalu, BNN telah menindak sebanyak 12 kali, narkotika yang disita berjumlah sekitar 570 kg sabu dan sekitar 200ribu butir ekstasi. Ada delapan kelompok jaringan yang diungkap oleh BNN. Narkoba masuk dari Malaysia melalui Selat Malaka dengan menggunakan kapal nelayan," kata Heru Winarko menjelaskan.

"Pada dasarnya trend perkembangan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2017 turun, akan tetapi jumlah tersebut tetap tinggi, ada sekitar 3,3 juta jiwa penyalah guna narkoba," kata Heru Winarko.

Tantangan pertama, dari penanganan narkoba yaitu pesatnya perkembangan *New Psychoactive Substance (NPS)*. "Ada 739 jenis NPS yang beredar di dunia, 71 NPS beredar di Indonesia, 65 sudah diatur dalam Permenkes, dan enam belum diatur dalam Permenkes. Perkembangan NPS menciptakan celah bagi kejahatan dikarenakan banyak narkoba jenis baru yang belum diatur oleh hukum," kata Heru Winarko.

Tantangan kedua adalah adanya ancaman teknologi informasi (*cyber*). "Perkembangan teknologi akan menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi," kata Heru Winarko. Ada tiga jalur peredaran narkoba melalui



Aparat hukum yang bermain narkoba adalah para pengkhianat bangsa yang harus dibersihkan

Kepala Badan Narkotika Nasional, Irjen Pol Drs. Heru Winarko, S.H.

dunia siber, yaitu *surface web market* (peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial dan website), *deep web market* (peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak), dan *cryptomarket* (transaksi menggunakan *crypto currency* melalui internet, tidak mudah dilacak, identitas tersembunyi).

Tantangan ketiga adalah adanya aparat yang terjerat dalam narkoba. Heru Winarko menyebutkan bahwa aparat hukum yang bermain narkoba adalah para pengkhianat bangsa yang harus "dibersihkan". "Keterlibatan penegak hukum dan politisi menjadi perusak sistem pemberantasan narkoba, dan itu sudah melibatkan aparat di berbagai sektor, baik di bea cukai, polisi, jaksa, hakim, sipir, tentara, bahkan hingga politis," kata Heru Winarko. Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan kapasitas rehabilitasi narkoba. Saat ini kapasitas fasilitas rehabilitasi pemerintah (milik BNN, Kemenkes, Kemensos, Pemda) hanya mencapai 2 persen serta fasilitas rehabilitasi masyarakat dan swasta hanya 1 persen. "Kapasitas rehabilitasi di Indonesia masih sangat terbatas, sementara kapasitas rehabilitasi di negara-negara maju 18-22 persen," kata Heru Winarko. (END)



Otto Scharmer Berikan Materi Pada Peserta MAKING INDONESIA 4.0

Penemu Theory U, Otto Scharmer berikan materi mengenai “Theory U: Inovasi untuk Indonesia Lebih Baik” pada peserta Making Indonesia 4.0. di Hotel Bidakara, Jakarta (5/7).

“

Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus mulai belajar mendengar kembali
- C. Otto Scharmer

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Program Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia yang diselenggarakan bersama-sama oleh Kemenko Maritim RI, Kemristekdikti RI, serta Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas RI selaku pelaksana tugas harian melihat urgensi akan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menko Ekonomi Indonesia Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu, Menristek Dikti Muhammad Nasir, dan Prof. Otto Scharmer.

Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Menko Ekonomi Indonesia, Darmin Nasution, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. “Jika Anda tidak punya infrastruktur yang memadai, pasti banyak kelemahan dan inefisiensi. Tahun depan, pemerintah akan sangat fokus pada peningkatan kapasitas SDM, melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Memang dalam waktu yang lalu, kita kurang menyentuh peningkatan kapasitas ini,” kata Darmin Nasution.

“Saya kira program ini disiapkan adalah untuk mulai membuka cakrawala untuk menuju perubahan dari perilaku dan kapasitas manusianya itu sendiri. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus mulai belajar mendengar kembali. Kita harus belajar bekerjasama kembali, tanpa kita mempersiapkan diri untuk kembali mulai mendengar,

kembali mau bekerjasama, maka perubahan yang sedang terjadi di dunia ini, itu akan luput dari jangkauan kita, dan kita akan tertinggal di dalamnya,” kata Darmin Nasution di hadapan para peserta Making Indonesia 4.0.

Sambutan selanjutnya yaitu dari Menristekdikti Moh. Nasir selaku Ketua Program. Moh. Nasir mengatakan, “Kalau kita lihat di era 4.0, 70 persen pekerjaan nanti akan diambil di bidang *science*, matematika, *internet of things*, dsb. Dalam hal ini, kita harus belajar sepanjang hayat. Kalau di Eropa dikenal dengan *4th Industrial Revolution*, kalau di China disebut *Making China 2025*, di Indonesia makin Indonesia 4.0. Di samping itu, dibutuhkan kecakapan *social skill* dalam bekerja, dalam hal ini pejabat yang biasa dilayani mengubah kebiasaan dilayani menjadi *how to satisfy customers*.” salah satu pendiri Presencing



© dok.humas/ri



dok.humas/ri

C. Otto Scharmer menyampaikan Theory U kepada peserta Making Indonesia 4.0 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara

Institute. Konsep *presencing* merupakan pemahaman untuk melihat apa yang ada di masa lalu, masa kini, serta merasakan di masa depan. Di awal kuliah, Scharmer memberikan materi mengenai *Iceberg Model*. "Dari *Iceberg Model* dapat dilihat bahwa 10 persen realitas ada di atas air, tapi 90 persen realitas ada di bawah laut, yang tidak kelihatan oleh mata. Untuk bergerak dari atas ke bawah adalah pola pemikiran, apa yang anda tahu adalah isu yang sama," kata Otto Scharmer. Scharmer membagi *Iceberg Model* ke dalam lapisan sosiologis (*sociological divide*), lapisan struktur (*structure divide*), dan lapisan spiritual (*spiritual divide*).

Scharmer melihat pentingnya kesadaran manusia pada ketiga lapisan tersebut. "Kehancuran bumi akibat tidak adanya kesadaran manusia terhadap lapisan-lapisan tersebut mengakibatkan tingginya eksploitasi terhadap bumi. Saat ini, kita menggunakan 1,5 kali lipat dari kapasitas planet Bumi kita. Kita mengeksploitasi bumi dengan berlebihan," kata Otto Scharmer

di hadapan para peserta kuliah.

"Apa yang saya sampaikan kepada Anda adalah bukan hal yang baru. Anda dan saya memiliki ketiganya, semuanya sudah ada di dalam diri kita sendiri, bukan budaya baru," kata Scharmer. Dalam menghadapi permasalahan, sebuah komunitas bisa melakukan dua jenis respon. "Sesungguhnya banyak dari kita yang merasakan bahwa diri kita bukan bagian dari pilihan dan solusi. Padahal pemikiran tersebut adalah tidak benar. Saat ada gangguan/kekacauan (disrupsi), ada dua langkah yang dapat kita ambil, pertama berupa *turning backward* atau menghindari masalah, dan kedua adalah *learning forwards* atau belajar maju ke depan," kata Scharmer.

Turning backward adalah *freeze reaction* (tidak melakukan apa-apa), dan reaksi tersebut adalah menutup pikiran, menutup hati dan menutup kebaikan, yang berwujud *ignorance* (pengabaian), *hate* (kebencian), dan *fear* (ketakutan). "Perilaku-perilaku tersebut bila dibiarkan akan menjadi perilaku sehari-hari atau *operating behavior*. Bentuk

dari tindakan tersebut, pertama adalah *denial* atau penolakan. "Setidaknya terdapat 1350 jumlah kebohongan yang dilakukan trump di awal-awal masa pemerintahan. Kebohongan tersebut 70 persen dibagikan di Twitter dibanding informasi yang akurat. Jadi kebohongan lebih mudah diiklankan, itulah mekanismenya, dalam demokrasi saat ini," kata Scharmer.

Sementara itu, ada langkah yang berlawanan dengan *turning backward* atau terus belajar (*learning forward*), yaitu terdiri tiga langkah pertama memiliki rasa ingin tahu yang muncul dalam bentuk keterbukaan pikiran (*curiosity/open mind*), rasa welas asih yang berwujud dengan keterbukaan hati (*compassion/open heart*), keberanian yang berwujud keinginan untuk menolong (*courage/open will*). "Fenomena fundamentalisme, trumpisme, yang disebabkan oleh disrupsi/kehancuran dan sedikitnya kapasitas untuk maju ke depan (*lead forward*), untuk mengakses apa yang harus diketahui," kata Scharmer. (END)

Alex Nurdin: Sumatera Selatan Adalah Daerah *Zero Conflict*

Gubernur Sumsel Berikan Kuliah Pada Peserta PPRA LVIII

Daerah Sumatera Selatan merupakan daerah *zero conflict* namun tetap boleh berdemonstrasi

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Alex Nurdin memberikan materi kepada peserta PPRA LVIII di Gedung Pancagatra Lt. 3, Lemhannas RI (10/7). Alex Nurdin di awal kuliah menyebutkan bahwa dirinya sudah lima kali mengikuti pemilihan kepala daerah. “Dari kelima pemilihan kepala daerah tersebut, saya memenangkan dua kali menjadi bupati, dua kali menjadi gubernur, dan satu kali kalah dalam Pilkada Jakarta,” kata Alex Nurdin yang disambut dengan tepuk tangan para peserta PPRA LVIII.

Saat ini, Sumatera Selatan menjadi kota yang sangat maju didukung dengan berbagai infrastruktur olahraga yang mumpuni. “Membangun daerah tidak hanya cukup dengan APBD, kita butuh investasi,” kata Nurdin.

Sumatera Selatan, sebagaimana disebutkan oleh Alex Nurdin, bukanlah daerah dengan provinsi terkaya. “Kami bukanlah provinsi terkaya, tapi kami cari potensi. Hal utama yang perlu dilakukan adalah mempromosikan daerah lewat jalur wisata yakni melalui berbagai *event* olahraga,” kata Nurdin. Sumatera Selatan telah menjadi penyelenggara dalam *event* baik nasional maupun internasional, seperti





Kami bukanlah provinsi terkaya, tapi kami cari potensi. Hal utama yang perlu dilakukan adalah mempromosikan daerah lewat jalur wisata yakni melalui berbagai event olahraga - Alex Nurdin

PON 2016, 3rd Islamic Solidarity Games 2012, Asean University Games, dan pada tahun ini Asian Games Jakarta – Palembang 2018.

“Daerah Sumatera Selatan merupakan daerah *zero conflict*. Meskipun daerah dengan *zero conflict*, kami tetap memperbolehkan demonstrasi, karena itu diatur dalam undang-undang. Demonstrasi yang tidak diperbolehkan adalah yang merusak,” kata Nurdin.

Saat ini, Jakabaring Sport City yang berada di kota Jakabaring Sumatera Selatan adalah kota olahraga internasional yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas olahraga,

berbagai pendukung, dan transportasi. “Kami adalah yang pertama di Indonesia, bahkan ASEAN. Jakabaring Sport City didukung oleh *Light Rail Transportation, hydrogen car/electric car*. Penggunaan kendaraan *electric car* di Sumatera Selatan lebih dulu dua tahun dibanding di Jepang. Di negara tersebut, *electric car* akan digunakan pada 2020, sementara di Sumatera Selatan pada 2018,” kata Alex Nurdin.

Dalam kesempatan tersebut, Alex Nurdin juga menyebutkan tiga alasan utama bagaimana Sumatera Selatan terpilih sebagai daerah yang dipercayai pemerintah pusat dan dunia sebagai penyelenggara event olahraga bergengsi. “Kalau sebuah daerah dipercaya menjadi penyelenggara olahraga, maka daerah tersebut dipercaya oleh dunia. Alasannya pertama, kondusivitas daerah dengan *zero conflict*. Alasan kedua yaitu pengalaman. Serta alasan terakhir adalah infrastruktur,” kata Alex Nurdin. (END)



Menteri Bappenas Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi di Seluruh Wilayah Indonesia Bukan Pekerjaan Mudah

Menteri Bappenas Berikan Kuliah Kepada Peserta PPRA LVIII

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro berikan kuliah kepada peserta PPRA LVIII di Gedung Pancagatra Lt. 3, Lemhannas RI (6/7).



Dalam kesempatan tersebut Bambang Brodjonegoro menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018.

Di hadapan para peserta, Bambang PS Brodjonegoro menyebutkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6 persen bahkan lebih jika saja tidak ada ketimpangan antar wilayah. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,4 persen, sementara pada tahun 2017 lalu realisasinya 5,07 persen. Dengan bahasa lain, jika tidak ada ketimpangan, pertumbuhan ekonomi RI dapat ditopang daerah-daerah lain di luar Jawa dan Sumatera yang selama ini merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi," kata Bambang.

"Tapi 6 persen itu dengan syarat sebenarnya bahwa motor pertumbuhan tidak hanya Jawa Sumatera tapi seluruh Indonesia yang tersambung dengan baik dan tidak ada krisis sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998,"

kata Bambang di sela-sela perkuliahan. Bambang mengatakan bahwa saat ini ekonomi dalam negeri masih banyak ditopang oleh Jawa. "Porsi kontribusinya mencapai 40 persen," kata Bambang. Sementara itu wilayah lain masih kecil. "Sumatera hanya 20 persen, lainnya lebih kecil," katanya.

Bambang mengatakan, "Pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia bukan pekerjaan mudah." Seluruh Indonesia perlu tersambung dengan baik. Oleh karena itu, mencapai pertumbuhan lebih dari 6 persen menurutnya, tidak bisa dilakukan secara cepat. Meratakan pertumbuhan harus dilakukan secara perlahan dan pasti. Salah satu cara yang dia usulkan, menaikkan secara pelan-pelan kontribusi ekonomi luar Jawa dengan mendorong pengembangan industri manufaktur.

Selain itu, Bambang juga mengkhawatirkan perang dagang yang digencarkan Amerika Serikat (AS) akan berdampak pada perkembangan ekonomi daerah.



Dampak perang dagang itu berpotensi mengarah pada kawasan dengan masyarakat yang bergantung pada industri manufaktur, khususnya tekstil. penghapusan insentif GSP
- Bambang PS Brodjonegoro



Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump berencana mengevaluasi kembali kebijakan pemotongan tarif bea masuk atau Generalized System of Preference (GSP) ke beberapa produk ekspor, termasuk dari Indonesia.

Bambang mengatakan dampak perang dagang itu berpotensi mengarah pada kawasan dengan masyarakat yang bergantung pada industri manufaktur, khususnya tekstil. Pasalnya, tekstil menjadi salah satu barang ekspor yang terkena penghapusan insentif GSP.

Menurut Bambang, kebijakan tersebut otomatis akan mempengaruhi jumlah ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut. "Kalau ekspor produk atau komoditas terganggu, dikhawatirkan nanti perekonomian di daerah penghasil komoditas atau barang ekspor tersebut bisa terganggu," jelas Bambang. Saat ini, pemerintah telah melakukan negosiasi dengan AS terkait rencana evaluasi GSP agar ekspor tekstil dari Indonesia ke AS tak terganggu. Hal utama yang perlu dilakukan oleh pengusaha

tekstil dalam negeri, yakni menjaga daya saing produk tekstil itu sendiri.

"Kalau menjaga daya saing, lalu dihalangi suatu negara harusnya produk yang sudah kompetitif ini bisa mengalir ke negara lain. Harusnya jaringan ekspornya tidak terganggu," kata Bambang menambahkan. Untuk itu, kata Bambang, pemerintah berusaha menjalankan sejumlah

program mengatasi ketimpangan daerah seperti menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dan Sumatera. Nantinya di daerah yang dikembangkan tersebut akan dibuat kota-kota metropolitan baru seperti Jakarta. Kemudian dibangun pusat-pusat industri manufaktur, tekstil, atupun otomotif yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. "Yang suatu saat nanti bisa diharapkan jangka pendek pelan-pelan menaikkan peran dari luar Jawa dibandingkan pulau Jawa sendiri," kata Bambang. (END)





Menkominfo: Ekonomi Masa Depan adalah pada *Digital Space* Kuliah Menkominfo pada Peserta PPRA LVIII

Angka proyeksi ekonomi digital 2020 ini diperkirakan sebesar 20 persen dari total PDB (produk domestik bruto) Indonesia



Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa e-commerce di Indonesia akan terus berkembang
-Rudiantara

Ekonomi masa depan adalah pada *digital space*. Industri harus saling berkonsolidasi untuk memajukan ekonomi digital, tidak bisa jalan sendiri-sendiri," kata

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada peserta PPRA LVIII di Lemhannas RI (28/6).

Indonesia tahun ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam lima tahun terakhir. Tetapi pertumbuhan industri e-commerce justru semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air.

"Bukan tak mungkin nantinya industri e-commerce dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional," harap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Rudiantara mencoba semua kalangan untuk mendorong ekonomi digital kuat di ASEAN. Dengan begitu Asia Tenggara telah menjadi kuat ketika arus kemajuan

teknologi digital akan masuk ke ASEAN.

Rudiantara berharap, pola pikir mengenai bisnis dapat diubah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sehingga Indonesia mampu menjadi pemimpin di ASEAN dengan sektor ekonomi digital. "Saya berkeyakinan startup lokal Indonesia bisa menjadi regional company yang berdaya saing, baik di dalam maupun luar negeri," ujar Rudiantara.

Rudiantara sangat optimis sebab kebanyakan pelaku bisnis e-commerce di tanah air berskala kecil dan menengah (UKM). "Seperti yang kita ketahui, bisnis UKM menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi sekalipun," kata Rudiantara. Melalui industri e-commerce, Rudiantara berharap dapat terus dikembangkan dan mendukung perekonomian Indonesia yang diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada tahun 2020 nanti.

Potensi industri e-commerce di Indonesia memang tidak dapat





dipandang sebelah mata. Dari data analisis Ernst & Young, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia.

“Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa e-commerce di Indonesia akan terus berkembang,” kata pria yang pernah berkarir di perusahaan komunikasi Indosat, Telkomsel, dan Exelindo tersebut. “Tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan chatting, masyarakat di kota-kota besar kini menjadikan internet dan e-commerce sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Setiap kita di sini pasti punya aplikasi e-commerce di ponsel masing-masing,” kata Rudiantara.

Bisnis ini memiliki nilai bisnis yang sangat besar, tetapi sayangnya sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur bisnis online ini. “Pada akhir tahun 2014 saja, nilai bisnis industri e-commerce Indonesia mencapai USD 12 miliar,” kata Rudiantara. Oleh karena itu, menurut Rudiantara, pada akhir tahun 2014 pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan, baik dari kalangan asosiasi dan pelaku usaha e-commerce telah bekerja bersama-sama dalam menyiapkan ekosistem yang baik untuk mengembangkan industri e-commerce lokal.

Setidaknya ada beberapa potensi yang menghambat potensi pertumbuhan e-commerce di Indonesia yaitu pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, logistik, serta edukasi dan

sumber daya manusia. “Isu-isu tersebut harus dikerjakan bersama-sama dengan lembaga terkait agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan tersinkronisasi,” kata Rudiantara.

Rudiantara memproyeksikan pada tahun 2020 nanti, ekonomi digital di Indonesia bisa tumbuh mencapai 130 miliar dollar AS atau Rp 1.700 triliun (kurs Rp Rp 13.333 per dollar AS). “Angka proyeksi ekonomi digital 2020 ini diperkirakan sebesar 20 persen dari total PDB (produk domestik bruto) Indonesia,” kata Rudiantara.

Proyeksi ini naik dari realisasi 2017 sebesar 75 miliar dollar AS atau Rp 1.000 triliun. Rudiantara menjelaskan untuk mencapai proyeksi ekonomi digital ini. “Pada masa kini di era serba teknologi digital, sinergi antar perusahaan Indonesia amat penting dan diperlukan,” kata Rudiantara. [END]





dok: humas

Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals*

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc., memberikan materi kepada peserta PPRA LVIII di Gedung Pancagatra Lt. 3, Lemhannas RI (1/7).

Luas Indonesia jika dibandingkan dengan benua Eropa sejauh jarak antara Spanyol dan Turki. Hal tersebut merupakan jangkauan yang sangat besar untuk rentang kendali," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. mengawali pemberian materi kepada peserta PPRA LVIII, Lemhannas RI (12/7).

Dalam kesempatan tersebut Siti Nurbaya membahas pengelolaan sumber kekayaan alam dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*. Siti Nurbaya menyampaikan hal yang menjadi perhatian penting dalam keterkaitan sumber daya alam dan sistem demokrasi adalah integrasi tiga komponen utama yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. Ketiga komponen tersebut terintegrasi dengan sistem demokrasi, di mana masing-masing

komponen tersebut saling berhubungan. "Dalam bernegara dan berpemerintahan secara langsung kita bersinggungan dengan legitimasi negara, sehingga kita harus peka apakah kelakuan kita mengganggu negara. Begitu juga di dalam aspek lingkungan, antara lingkungan dan sumber daya alam itu seperti dua mata uang. Jika menyebut sumber daya alam, maka secara sudut pandang praktik dan teori berarti memanfaatkan dengan lebih baik. Alam mempunyai empat fungsi regulasi dalam mengatur proses ekologis untuk menunjang kehidupan misalnya siklus hidrologi, siklus energi, rantai karbon, rantai nitrogen dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut terganggu maka alam pun terganggu," jelas Siti Nurbaya.

Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai ekosistem. Konsep dasar ekosistem, menurutnya, adalah sistem ekologi dan sistem sosial. Ekosistem

sendiri mempunyai arti dinamika yang kompleks suatu komunitas tanaman, hewan, dan mikroorganisme dan lingkungan nir-hayati yang berinteraksi sebagai unit yang berfungsi.

Dalam legislasi, yang sedang terjadi di DPR saat ini adalah penyiapan RUU tentang pertanahan yang ingin mengatur ulang bahwa semua tanah termasuk hutan harus diadministrasikan sebagai tanah. Padahal di dalam TAP MPR sudah dibedakan antara tanah dan sumber daya agraria. Hal-hal tersebutlah yang sekarang sedang berkembang. Secara ilmu pengetahuan dan internasional terdapat sistem-sistem baru tentang kebumihuan yang berkaitan dengan sosial dengan alam atau bumi baik itu soal kesehatan, *climate change*, pertanian, *unity in diversity* dan lain sebagainya. Maka, secara umum dapat dilihat bahwa beban ekosistem dikarenakan beberapa hal yang salah satunya adalah



dok: humas



kurangnya dukungan pemerintah.

Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan *new skills governance* sehingga kompetensinya mampu membuat konsep *environmental governance* yang meliputi satu set regulasi, praktek, kebijakan, kelembagaan dalam hal bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan. Konsep tersebut dimaksudkan untuk bisa menangani isu-isu terkait *environmental governance*.

Maksud dari sistem keberlanjutan adalah upaya agar kondisi sumber daya alam yang sama pada saat ini dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Harapannya adalah adanya nilai yang lebih atau setidaknya sama seperti kondisi sumber daya alam saat ini. Adapun konsep yang sudah diterapkan sejak tahun 1980-an, yaitu kebutuhan pembangunan yang dilaksanakan untuk kebutuhan saat ini tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dari alam. Maka, sebuah proses perubahan dalam eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi perubahan teknologi, dan perubahan institusi harus berlangsung secara harmonis dan dilaksanakan baik untuk saat ini dan yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Tujuan strategis *sustainability*, jelas Siti Nurbaya, yaitu menjaga proses ekologis esensial dan sistem pendukung kehidupan (*maintenance of essential ecological process and life support system*), memelihara keaneka-ragaman genetik (*preservation of genetic diversity*), dan penggunaan spesies dan ekosistem dengan memperhatikan kesinambungannya (*sustainable utility of species and ecosystems*).

Maka untuk mencapai tujuan tersebut harus diketahui ukuran-ukuran yang sesuai seperti ukuran kapasitas lingkungan penggunaan sumber daya dan limbah, polusi, keaneka-ragaman hayati. Jika tujuan tersebut terarah dengan baik berdasarkan ukuran yang ada maka kualitas kehidupan akan terjamin. Adapun kualitas kehidupan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan dasar : pangan, air, rumah, energi, informasi, pendidikan dan latihan rekreasi dan kebudayaan kebebasan (politik dan pribadi), akses kepada barang dan jasa, pendapatan yang cukup dan adil, kesempatan kerja, kesehatan fisik dan mental, serta keindahan dan estetika

Kepada peserta PPRa LVIII, Siti Nurbaya menegaskan bahwa kita mempunyai kewajiban menjaga pengurangan emisi ke atmosfer sebesar 2,8 giga ton. Hal ini dilakukan dengan mengontrol sistem legalitas kayu untuk menghilangkan stigma Indonesia sebagai sumber *illegal logging*. Dengan demikian, langkah-langkah korektif sudah dilakukan dengan mempertegas perubahan iklim untuk mencapai sistem pembangunan yang sustainable.

Adapun beberapa tantangan ke depannya adalah permasalahan terkait sampah dan limbah yang saat ini masih dipersiapkan dan tantangan tambang sungai dan gambut masih dirapihkan. Tantangan lain yang dihadapi yaitu keinginan untuk mempertajam konsep kolaboratif antara pelaku ekonomi rakyat dan korporat, karena korporat tersebut dalam bentuk konglomerat. Selain itu, *financing* dan APBN juga masih menjadi salah satu yang mewarnai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mendukung *sustainability* yang diharapkan. [YA]



Untuk menanggulangi beban ekosistem diperlukan *new skills governance* sehingga kompetensinya mampu membuat konsep *environmental governance* meliputi satu set regulasi, praktek, kebijakan, kelembagaan dalam hal bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan.

- Siti Nurbaya Bakar





Kepala BKP Indonesia Miliki Potensi Sumber Daya Pangan Besar

**Ceramah Kepala Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian Pada PPRA LVIII**

Sebuah negara bisa menjadi besar dan kuat salah satunya karena ditopang oleh industri strategis pertahanannya.

Indonesia memiliki potensi sumber daya pangan yang besar, hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*),” kata Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian di hadapan peserta PPRA LVIII di Gedung Pancagatra, Lemhannas RI (12/7).

Dalam kesempatan tersebut, Agung Hendriadi memberikan materi mengenai “Implementasi Kedaulatan Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”. Ia memaparkan mengenai tantangan ketahanan pangan dan gizi Indonesia, potensi sumber daya pangan Indonesia, upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta terobosan kebijakan dan capaian kinerja.

Mengawali kuliah, Agung Hendriadi mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno “Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka malapetaka; oleh karena itu perlu usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner”. Agung Hendriadi mengutip pernyataan Soekarno sebab menurutnya dalam membangun

ketahanan pangan nasional dibutuhkan langkah strategis dan komprehensif.

“Membangun sistem ketahanan pangan nasional dibutuhkan langkah yang tepat. Pertama, Indonesia harus memiliki sumberdaya yang berkualitas, baik lahan, air, SDM, teknologi, kelembagaan maupun budaya. Kedua memiliki lingkungan strategis dan dalam negeri yang tepat, baik penduduk, perubahan iklim, kinerja ekonomi, dinamika pasar pangan, dan tangguh menghadapi bencana. Ketiga, memiliki kebijakan ekonomi dan pangan, kebijakan otonomi, dan desentralisasi yang terintegrasi dan sejalan, baik dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, sampai pada rakyat. Terakhir, ketiga langkah tersebut akan menghasilkan pangan yang berkualitas dan bangsa yang memiliki ketahanan pangan yang kuat, hingga pada akhirnya menghasilkan SDM yang tangguh,” kata Agung.

Agung, di hadapan para peserta PPRA LVIII, memaparkan peta mengenai keamanan dan ketersediaan pangan Indonesia 2018 (*Food Security and Vulnerability Atlas 2018*). “Secara umum, Indonesia berada dalam kondisi ketahanan pangan yang baik, akan tetapi hampir di tiap provinsi terdapat titik yang rawan, dan itu perlu



diwaspadai," kata Agung Hendriadi.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain besarnya jumlah penduduk dan masih terbatasnya konversi lahan. "Dalam melihat tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan, dapat dilihat dua aspek, yaitu pertama dalam aspek permintaan (*demand*) dan kedua dalam aspek persediaan (*supply*)," kata Agung Hendriadi. Terkait dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, saat ini telah tercatat ada lebih dari seratus jenis sumber karbohidrat, seratus jenis kacang-kacangan, 250 lebih jenis sayuran, dan 450 lebih jenis buah-buahan. "Potensi tersebut tentunya juga menguntungkan secara ekonomis misalnya mendorong potensi industri kuliner pangan lokal seiring meningkatnya wisata lokal, serta mendorong tumbuhnya LSM dan kelompok masyarakat bidang pangan dan gizi," ujar Agung.

Salah satu solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan program diversifikasi pangan, seperti konversi dari padi atau beras menjadi aneka umbi-umbian dan panganan olahan, memiliki berbagai tantangan seperti ketersediaan bahan baku yang terbatas, harga kurang kompetitif dibanding beras, serta produktivitas pangan lokal umumnya masih rendah karena riset terkait varietas maupun teknologi kurang intensif. Menurut Agung, salah

satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan mendorong pengembangan industri kerakyatan masyarakat

"Ini kami tingkatkan dulu olahannya, dan akan kami kembangkan skala industri, industri kerakyatan yang dimiliki masyarakat dan pemilik pangan lokal ini yang akan kami dorong," kata Agung. Agung mengatakan, selama ini industri rumahan pangan lokal seperti singkong hingga aneka olahan umbi-umbian kerap kalah bersaing karena hanya sebatas produksi saja. "Kita kalah di kemasan, kurang mampu mengemas yang baik," jelas Agung. (END)

“

Indonesia memiliki potensi sumber daya pangan yang besar, hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*)

- Agung Hendriadi,

Kepala Badan Ketahanan Pangan

PPRA LVII Laporkan Hasil SSDN di Empat Provinsi

Usai melaksanakan Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) pada pekan lalu (16-19 Juli 2018), peserta PPRA LVII (Program Pendidikan Reguler Angkatan) melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lemhannas RI di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Lantai III Lemhannas RI.

SSDN tersebut dibagi ke dalam empat kelompok dengan tujuan empat provinsi yang berbeda yaitu, Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau (24-25/7). Acara diawali dengan laporan dari Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, bahwa tujuan dari pelaksanaan SSDN adalah membekali para peserta agar memiliki cakrawala berpikir lebih komprehensif dan integral tentang kondisi objektif dari daerah ataupun provinsi yang dikunjungi, mempertajam kemampuan dalam menemukan isu-isu strategis di daerah dan menemukan akar permasalahannya serta menganalisis dan mencari solusinya.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa tujuan dari salah satu kegiatan SSDN PPRA LVII telah tercapai. "Saya yakin dengan penjelasan dan paparan laporan dari masing-masing kelompok tujuan SSDN tadi dengan menampilkan data, fakta, dan rekomendasi menunjukkan

bahwa tujuan dari salah satu kegiatan SSDN PPRA LVII 2018 Lemhannas RI telah dicapai," ujar Agus.

Melalui kegiatan SSDN, lanjut Agus, peserta telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat untuk memajukan proses pembangunan di daerah. Selain itu, peserta juga telah berkontribusi kepada lembaga khususnya dalam memvalidasi data pengukuran ketahanan nasional. Turut hadir dalam acara Plt Gubernur Aceh yang diwakili oleh Bapak Dr. M. Jafar, Asisten I Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Tenaga Ahli Pengkaji dan Pengajar, Tenaga Profesional, serta Pejabat Struktural Lemhannas RI.



Provinsi Aceh

Kunjungan SSDN oleh peserta PPRA LVII di Provinsi Aceh pada 16-19 Juli 2018, dipimpin oleh Laksda TNI Riyadi Syahardani Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Lemhannas RI dengan 32 orang peserta PPRA LVII. Para peserta juga didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri dan HAM Lemhannas RI Wredatama Kisnu Haryo, S.H., M.A selaku Tenaga Ahli I dan Tenaga Profesional Bidang Pertahanan dan Strategi Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gusti Putu Buana, SAP, MAP selaku Tenaga Ahli II.

Adapun agenda kegiatan SSDN di Provinsi Aceh antara lain melakukan ramah tamah dengan Plt Gubernur Provinsi Aceh di kantor Gubernur Aceh. Usai melakukan pertemuan tersebut, agenda berikutnya adalah melakukan pertemuan dengan Pemprov. Aceh,



dan pertemuan dengan Todat, Toga, Tomas. Selain itu, para peserta juga mengunjungi beberapa instansi yang ada di Provinsi Aceh yaitu Ketua DPRA Prov. Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda beserta Danlanud dan Danlanal, Wakapolda Aceh, pertemuan dengan Todat, Toga, Tomas Kota Sabang dan Direktur PT. SAI. Para peserta juga mengadakan kunjungan ke beberapa tempat bersejarah seperti Museum Bencana Tsunami Aceh, Histori Perjuangan dan Pusat Kebudayaan Aceh, Tugu KM Nol, dan Situs Peninggalan Islam/ Masjid Baiturahman.

Pada laporan yang dipaparkan oleh peserta disebutkan bahwa Provinsi Aceh sangat luar biasa karena pembangunan yang dilaksanakan sangat luar biasa, hal tersebut berawal dari titik nol saat bencana tsunami pada akhir tahun 2004, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang





Pemerintahan Aceh. Sampai saat ini, pembangunan yang dilakukan sudah begitu pesat. Hal tersebut menunjukkan bahwa rakyat Aceh sudah *move on* dan mempunyai tekad kuat untuk mensejahterakan rakyatnya.

Para peserta juga menyajikan data-data yang berkaitan dengan Indeks Ketahanan Nasional (IKN) di Provinsi Aceh pada masing-masing gatra. Terdapat delapan gatra yang dianalisis yaitu, gatra geografi, gatra demografi, gatra sumber kekayaan alam, gatra ideologi, gatra politik, gatra sosial dan budaya serta gatra pertahanan dan keamanan.

Dari data-data yang telah disajikan berdasarkan gatra politik, ekonomi dan hankam dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Nasional pada Provinsi Aceh dapat dikatakan cukup tangguh dengan skor nilai 2,65. Khusus untuk gatra ekonomi berdasarkan hasil pengecekan dan validasi mengalami

peningkatan dari posisi rawan dengan skor 2,60 menjadi 2,73 skala ketahanan nasional cukup tangguh.



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada waktu yang bersamaan, kunjungan SSDN dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung yang dipimpin oleh Marsma TNI Heraldy Dumex Dharma, S.A.P., M.Si. Peserta yang mengikuti kunjungan sebanyak 25 peserta. Kunjungan ini juga didampingi oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Pur Agus Widjojo, Marsda TNI Gutomo selaku pimpinan rombongan, Marsda TNI Pur Sumarman dan Sebastianus Sumarsono selaku Tenaga Ahli dan Marsma TNI Dr. Sungkono selaku Liason Officer, Kolonel Dr. Agus

Purwo selaku Sekretaris Rombongan.

Pada kegiatan SSDN ini, kelompok Provinsi Bangka Belitung melakukan kunjungan ke beberapa instansi untuk melakukan dialog dan diskusi yaitu Polda, Pemprov Babel, Unsur TNI (Korem, Lanal, Lanud), Kadin Babel, DPRD Prov Babel, Universitas Bangka Belitung, PT. Timah, P. Leebong, Pemkab Belitung, dan Tanjung Tinggi. Kegiatan SSDN Bangka Belitung PPRRA LVI berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan dapat memberikan masukan dalam pemecahan masalah pembangunan daerah. Secara umum rombongan SSDN diterima dengan baik oleh seluruh institusi di Provinsi Bangka Belitung, dan obyek yang dikunjungi.

Kelompok kunjungan Provinsi Bangka Belitung melakukan pengukuran Indeks Ketahanan Nasional adapun hasil penilaian secara agregat ketahanan nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sinergitas antara Gatra Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud dan Hankam sesuai Labkurtanas Lemhannas RI adalah 2,82 ini berarti kondisi ketahanan nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Cukup Tangguh. Dibandingkan dengan Profil Ketahanan Nasional Provinsi Bangka Belitung, Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional 2010 sebesar 2,65 yang berarti Cukup Tangguh, maka terjadi kenaikan sebesar 0,17.

Melalui kunjungan SSDN tersebut para peserta PPRRA LVII memberikan saran untuk Pemerintah Bangka Belitung mengenai program-program pembangunan ke depan harus lebih ditingkatkan dengan





memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada serta peluang dan kendala yang dihadapi. Kepada Lemhannas dan Pemerintah Pusat yang berkenaan, disarankan agar Pengukuran Ketahanan Nasional disosialisasikan sampai ke daerah-daerah untuk dapat dilakukan minimal setiap tahun, guna bahan masukan untuk mengantisipasi dan memprediksi serta mengambil kebijakan atas kemungkinan ancaman dan atau upaya mempertanggung ketahanan nasional. Namun perlu juga menyempurnakan parameter-parameter pengukuran yang ada saat ini agar dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi daerah dengan tetap mempunyai dasar pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.



Provinsi Sulawesi Tengah

Paparan selanjutnya yaitu Studi Strategis Dalam Negeri yang dilakukan ke ke Provinsi Sulawesi Tengah pada 16-19 Juli 2018. Dalam kesempatan tersebut, kelompok PPRA LVII melakukan studi ke sepuluh objek strategis yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Polda Sulteng, Korem

132/Tadulako, Lanal Palu, Lanud Masowu, Universitas Negeri Tadulako, Pemerintah Daerah Kota Palu, DPRD Kota Palu, Pemda Kabupaten Donggala, DPRD Kabupaten Donggala, dan PT. PLTU MPANAU di Palu.

Kelompok tersebut dipimpin oleh Kombes Pol Priyo Waseso, S.Si., M.P.P., dengan wakil ketua Kolonel Laut (T) Rachmat Hartoyo, dan sekretaris Kolonel CZI M. Jangkung Widyanto. Pimpinan rombongan kelompok tersebut yaitu Mayjen TNI Asro Budi, dengan Tenaga Ahli I Dr. Yulianus Pongtuluran, S.E., M.Ed., dan Tenaga Ahli II Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang.

Dalam kunjungan yang dilakukan oleh PPRA LVII ke Sulawesi Tengah terdapat beberapa temuan yang menarik, yaitu dalam aspek demografi yaitu terdapat vulnerabilitas terhadap mortalitas jadi lebih besar (peningkatan kematian penduduk) karena disebabkan pertambahan kasus penyakit Schistosomiasis (demam keong), selain itu mobilitas kependudukan yang bersifat spasial yang merupakan pertanda positif. Dalam aspek ideologi, terdapat hasil penelitian Universitas Tadulako bahwa terdapat potensi 60 persen mahasiswa yang terpapar radikalisme. Dalam hal politik, pelaksanaan Musrenbang Daerah masih bersifat

inklusif, terdapat 3.523 organisasi kemasyarakatan di seluruh kabupaten/kota, dalam aspek pertahanan dan keamanan daerah tersebut pemerintah daerah masih belum berkontribusi secara maksimal terhadap pendidikan bela negara di wilayah tersebut.

Atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Tengah, PPRA LVII memberikan rekomendasi antara lain, kepada pemerintah pusat yaitu pertama, Musrenbangda yang inklusif agar Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dapat menjadi model bagi pengaplikasian kebijakan tersebut di provinsi lainnya, kedua perlunya upaya deradikalisasi pelaku terorisme dan dipantau secara ketat oleh pusat serta ditingkatkan oleh pemda, ketiga perlunya mendorong pengembangan sektor desa, tani, ikan tangkap sebagai produk unggulan, dan keempat perlunya menampung aspirasi semua kelompok masyarakat agar ditampung dalam penyusunan kebijakan daerah.



Provinsi Kepulauan Riau

Kemudian selanjutnya adalah laporan hasil Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Provinsi Kepulauan Riau di hadapan Gubernur Lemhannas



RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Deputi Pendidikan Lemhannas RI, perwakilan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta para pejabat terkait di Gedung Trigatra Lt. 3 (25/7).

Kelompok tersebut diketuai oleh Kolonel Marinir Edy Prakoso, S.E., wakil ketua Kolonel Pnb Eduard Sri Wisnu, M.S.E., dan sekretaris rombongan Yulis Wuarti, S.E., Ak., M.Si., Sementara itu sebagai pimpinan rombongan Marsda TNI Tri Budi Satriyo, S.IP., M.M. Kelompok tersebut juga didampingi oleh Tenaga Ahli I Mayjen TNI (Purn) M. Nasir Majid dan Tenaga Ahli II Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib.

Para peserta PPRA LVII telah melakukan studi ke objek strategis yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Danlantamal IV Tanjung Pinang, Kapolda Kepri, Danrem 033/WP, Danlanud Tanjung Pinang, Walikota dan DPRD Kota Tanjung Pinang, Walikota Batam, PT. Bintang Resort Cakrawala, BP Batam, serta PT. Citra Shipyard pada 16-19 Agustus 2018 yang lalu.

Dalam studi yang telah dilakukan, diketahui bahwa, dalam aspek ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, perekonomian Kepri kian membaik memasuki tahun 2018, yaitu pada triwulan I 2018 terjadi penguatan ekonomi sebesar 4,47% (YoY). Di hadapan para pejabat Lemhannas RI serta perwakilan daerah, peserta juga memaparkan setidaknya terdapat

beberapa potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dalam aspek kelautan dan perikanan, investasi, pengelolaan kawasan *Free Trade Zone* Batam Bintang Karimun, serta permasalahan dalam aspek sosial budaya.

Selain itu, dalam hal potensi kelautan dan perikanan, Kepri memiliki potensi yang tinggi dalam sumberdaya kelautan, terutama dalam subsektor perikanan. Akan tetapi pemanfaatan tersebut masih sangat terbatas dan perlu didorong oleh investasi serta kemudahan pemberian kredit modal kerja yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Dalam hal investasi di Provinsi Kepri merupakan hal yang penting dalam meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Pemerintah Kepri telah berusaha dalam meningkatkan peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan yaitu UMKM melalui prioritas investasi untuk sektor tersebut. Dalam hal sosial budaya, Provinsi Kepri dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah tersebut yakni berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia, Kamboja dan Vietnam. Hal ini mengakibatkan provinsi Kepulauan Riau sangat rentan dihindangi penyakit masyarakat, seperti narkoba, minuman keras, judi dan prostitusi. Namun demikian yang akhir-akhir ini sangat menonjol adalah peredaran narkoba

yang sangat mengancam generasi muda.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di hadapan para pejabat terkait, pemapar merekomendasikan antara lain: pertama, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penyesuaian RUU tentang provinsi kepulauan yang sudah lama dibahas di DPR RI, khususnya terkait dengan pasal yang mengatur DAU dan DAK provinsi kepulauan yang tidak hanya memperhatikan luas daratan, namun juga memperhatikan luas perairan / lautan, selain itu perlu pasal yang mengatur agar provinsi juga diberikan kebebasan dalam penggunaan DAU dan DAK sesuai dengan APBD provinsi. Kedua, Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sementara harus berkoordinasi dengan BP Batam dalam hal perencanaan dalam mengembang kawasan wisata sekaligus dalam membina UMKM setempat yang mendukung sektor pariwisata di Kota Batam. Selain itu, peserta PPRA LVIII menyarankan agar Pemerintah provinsi Kepulauan Riau bersama jajaran forkopimda, agar meningkatkan sinergitasnya dengan memperketat dan menambah frekuensi patroli keamanan seluruh unsur terkait guna meminimalkan penyelundupan, terutama dalam menangkal masuknya narkoba ke Indonesia yang melalui pintu di perairan provinsi Kepulauan Riau. (YA/END)



Lemhannas RI Selenggarakan Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Angkatan I

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjono membuka kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi INTI Angkatan I di Ruang Pancasila Gedung Trigatra Lemhannas RI (30/7).

Kegiatan diawali dengan laporan dari Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI. Dalam kesempatan tersebut, disebutkan bahwa kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Angkatan I diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur aktivis, pemuda, pengusaha, dan pegawai swasta. Peserta berasal dari anggota INTI, organisasi Tionghoa, dan organisasi non-Tionghoa dengan komposisi 12 peserta perempuan dan 88 peserta laki-laki. Para peserta mewakili organisasinya masing-masing berasal dari Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Bali, Palembang, Pontianak, hingga Makassar.

Kegiatan tersebut direncanakan diselenggarakan pada 30 Juli sampai 5 Agustus 2018. Melalui pendidikan lima hari, para peserta akan mendapatkan materi pemantapan nilai dari empat konsensus dasar Bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Agus Widjono dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan Taplai dapat dijadikan sebagai momen renungan dan introspeksi diri akan pentingnya nilai-nilai luhur yang

perlu dijaga bersama-sama. "Saya berharap agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan tukar pendapat dan diskusi, sehingga peserta dapat memiliki pemahaman yang integral dan holistik mengenai konsensus bangsa," kata Agus Widjono.

Ketua Umum INTI Teddy Sugianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Lemhannas RI yang telah bekerjasama menyelenggarakan kegiatan tersebut. "Terima kasih kepada Lemhannas RI serta INTI, dan ormas lainnya atas dukungannya terhadap acara tersebut sehingga bisa merekatkan persatuan dan kesatuan serta implementasi nilai kebangsaan dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari," ujar Teddy Sugianto. "Kami titipkan 100 orang kader-kader terbaik INTI, ditambah perwakilan organisasi Tionghoa dan non-Tionghoa untuk dapat diajarkan mengenai Empat Konsensus Dasar bangsa Indonesia. Semoga setelah mengikuti kegiatan Taplai, para peserta dapat menjadi pionir dalam menerapkan nilai-nilai kesatuan berbangsa dan bernegara. Maksimalkan apa yang didapatkan untuk kemajuan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Teddy Sugianto. (END)



Kami titipkan 100 orang kader-kader terbaik INTI, ditambah perwakilan organisasi Tionghoa dan non-Tionghoa untuk dapat diajarkan mengenai Empat Konsensus Dasar bangsa Indonesia. Semoga setelah mengikuti kegiatan Taplai, para peserta dapat menjadi pionir dalam menerapkan nilai-nilai kesatuan berbangsa dan bernegara. Maksimalkan apa yang didapatkan untuk kemajuan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

- Teddy Sugianto



Enggartiasto Lukita

Keterbukaan Membawa Indonesia ke Dalam Rantai Pasok Global

Menteri Perdagangan Berikan Kuliah Pada Peserta PPRA LVIII

Menteri Perdagangan berikan kuliah pada Peserta PPRA LVIII di Gedung Pancagatra Lt.3, Lemhannas RI (31/7). Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan mengenai pro dan kontra perdagangan bebas dan proteksionisme

Perdagangan bebas menurut Enggartiasto ditujukan apabila sebuah negara memiliki spesialisasi atas produk tertentu, atau memiliki keunggulan kompetitif, serta skala ekonomi yang baik. Sementara itu, proteksionisme dilakukan dengan menentukan kebijakan tarif, kebijakan kuota, dan adanya non tariff barrier. “Non tariff barrier digunakan untuk melindungi produsen dalam negeri, dengan memberikan persyaratan tertentu sehingga barang dari luar negeri tidak mudah masuk ke dalam negara,” kata Enggartiasto Lukita.

Menurutnya, perdagangan bebas tidak hanya berarti transaksi perdagangan barang antar negara, namun juga melibatkan jasa, mobilitas orang dan perusahaan. Oleh karenanya, perdagangan bebas akan lebih banyak memberikan keuntungan dan membuka kesempatan.

“Mereka yang menyetujui perdagangan bebas memiliki dasar bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan pasar, tersedianya beragam pilihan barang bagi masyarakat, juga aliran modal yang lebih bebas.

Sementara itu, mereka yang menentang perdagangan bebas melihat bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan kesenjangan antara negara kaya dengan negara miskin,” kata Enggartiasto.

“Di tengah pro dan kontra apakah Indonesia perlu memberlakukan perdagangan bebas atau tidak, faktanya menunjukkan bahwa perdagangan meningkatkan dan memperbaiki ekonomi dunia. Akan tetapi, peta arus perdagangan global masih dikuasai oleh negara-negara maju,” kata Enggartiasto.

Indonesia mengalami tantangan global dalam perdagangan bebas yakni meningkatnya proteksionisme, kesepakatan dalam *multilateral trading system* menghadapi banyak friksi, serta meningkatnya tren kerjasama bilateral dan regional. “Perang tarif antara Amerika Serikat dan RRT menunjukkan bahwa tren proteksionisme kian menguat dan akan berdampak secara global. Selanjutnya sistem perdagangan multilateral menghadapi banyaknya perbedaan friksi antara negara maju, negara berkembang, dan *least developed countries* untuk menyelesaikan *the Doha Round*. Terakhir kini tren kerjasama mengarah kepada bilateral dan regional,

kedua bentuk kerjasama tersebut lebih mendominasi dalam kerangka perdagangan global,” kata Enggartiasto.

Di mata Indonesia keikutsertaan dalam perdagangan bebas adalah keniscayaan. Enggartiasto menyebutkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada April 2016 yang lalu keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas harus disesuaikan dengan fokus reformasi. “Fokus reformasi yang ditekankan Indonesia adalah keterbukaan dan kompetisi. Kami harus terbuka dan tidak mungkin lagi tertutup,” kata Enggartiasto di hadapan para peserta PPRA LVIII.

“Keterbukaan membawa Indonesia ke dalam rantai pasok global, meningkatkan dan memberdayakan sektor-sektor unggulan, meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta dapat bekerjasama dan bersinergi dengan berbagai pihak. Sementara itu, kompetisi dapat meningkatkan peran seluruh sektor ekonomi, menjalankan ekonomi secara efisien, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu bersaing di pasar domestik dan pasar global,” ujar Enggartiasto. (END)



Mr. Keith Tan, *Deputy (policy) Singapore Ministry of Defence (MINDEF)* memberikan kuliah umum kepada jajaran struktural Lemhannas RI, para peserta PPRA LVII dan LVIII, dan tamu undangan di Auditorium Gajah Mada pada Rabu (01/08).

Kuliah umum diawali dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Agus Widjojo mengatakan bahwa kedatangan Mr. Keith merupakan tanda hubungan baik antara kedua negara Indonesia-Singapura dalam bidang pendidikan dan hubungan bilateral. Ia juga menyampaikan kunjungan Mr. Keith bukanlah yang pertama sejak Oktober tahun lalu.

Singapura, menurut Agus Widjojo, adalah tetangga baik Indonesia yang memiliki aspek kesamaan dalam masyarakat, sosial dan budaya serta sejarah dalam membangun ASEAN. Dengan kedatangan Wakil Menteri Pertahanan Bagian Kebijakan diharapkan dapat memberikan wawasan terkait hubungan Indonesia-Singapura dalam ASEAN.

Di hadapan para peserta PPRA LVII dan LVIII, serta jajaran struktural Lemhannas RI, Keith menyampaikan penghargaan yang tinggi atas kesediaan Agus Widjojo dalam memberikan wawasan sejarah dan peran TNI kepada peserta kursus di lembaga pendidikan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura pada awal tahun 2018, dan ia berharap akan lebih banyak pertukaran kekayaan pengetahuan yang bermanfaat.

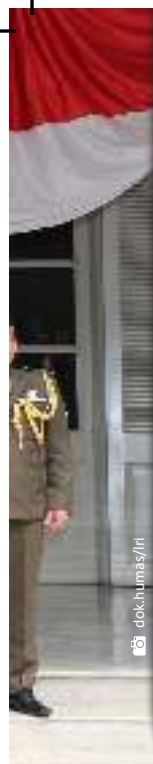
Mr. Keith juga sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada para peserta atas pengetahuan terkait dengan perkembangan global, regional maupun lokal. Ia menyampaikan bahwa hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura telah terjalin erat dan kuat selama lima dekade, hal tersebut terbukti dengan terselenggaranya perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura. Pendirian ASEAN pada 51 tahun yang lalu adalah salah satu contoh bentuk kerjasama yg pertama dilaksanakan Indonesia dan Singapura.

Saat ini jumlah keanggotaan ASEAN telah meningkat dua kali lipat. ASEAN berjalan dengan sangat baik sebagai suatu zona ekonomi. Sejak krisis keuangan global pada tahun 2008, ekonomi ASEAN bertambah lebih dari 60% dan pendapatan sebesar 45%. Ekonomi ASEAN merupakan salah satu kawasan dunia yang tumbuh sangat pesat dan disegani. "Sebenarnya, apabila saya mengunjungi negara lain di luar ASEAN, pejabat-pejabat senior menganggapi ASEAN sebagai contoh baik dari rangkai integrasi regional yang efektif dan damai, sebagai titik terang di dunia," jelas Mr. Keith.

Pada tahun ini, Singapura mendapat kehormatan sebagai ketua ASEAN. Singapura akan menjadi tuan rumah untuk *ASEAN Defence Ministers' Meeting*



dek: humas



atau ADMM. Dalam paparannya Keith menyampaikan bahwa perlunya mengkaji kembali sejarah Indonesia-Singapura di ASEAN untuk memperkuat kemitraan yang lebih baik di masa yang akan datang. Mr. Keith juga menyampaikan rasa kekhawatirannya terhadap generasi muda saat ini telah melupakan perkembangan ASEAN di abad 20 sampai konflik Indocina yang berkepanjangan sampai tahun 1970-an.

Sejarah ASEAN yang begitu panjang merupakan proses kesatuan dalam keragaman berdasarkan suatu pikiran yang sama yaitu ASEAN yang bersatu memiliki suara yang jauh lebih kuat dari pada negara masing-masing. Keberhasilan ASEAN di mata dunia terbukti dengan ketertarikan negara-negara kekuatan besar di dunia, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang dan Uni Eropa, telah membujuk ASEAN, dan mencari peluang membangun kerjasama dengan ASEAN.

Angkatan Bersenjata Indonesia dan Singapura keduanya tengah bekerjasama untuk menghadapi terorisme transnasional yang merupakan salah satu ancaman yang paling mendesak di saat ini. Pada bulan Nopember 2017, TNI dan SAF menyelenggarakan latihan geladi meja penanggulangan terorisme (CT TTX). Latihan tersebut memberikan kesempatan bagi para peserta dari berbagai jurusan,

baik pasukan khusus, intelijen militer, maupun polisi, untuk berdiskusi dan membahas respons operasional dengan berbagai scenario terorisme. Keith mengatakan bahwa SAF merasa latihan tersebut sangat bermanfaat dan tertarik untuk melanjutkan serta mengembangkan latihannya.

Berdasarkan jarak dekat antara Singapura dan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penanggulangan terorisme, terutama di kawasan Batam, Bintan dan Karimun, SAF berharap dapat berkolaborasi lebih banyak dengan satu-satuan TNI untuk membagi informasi dan bekerjasama dalam menjaga dan menghadapi ancaman.

Kemhan Singapura bekerjasama dengan Kemhan RI untuk memperkuat pembagian intelijen terorisme, dalam rangka inisiatif "Our Eyes" yang pertama kali diusulkan oleh Menhan RI Bapak Ryamizard pada tahun lalu. Dengan demikian secara pribadi, Mr. Keith merasa sangat optimis terhadap masa depan Indonesia-Singapura di ASEAN. Karena keduanya telah berkontribusi baik dalam sejarah ASEAN sebagai contoh keberhasilan Indonesia-Singapura pada ASEAN Charter dan Bali Concord II dalam mendirikan tiga pilar Komunitas ASEAN.

Peran kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN juga dapat dilihat dalam bidang

“ ASEAN yang bersatu memiliki suara yang jauh lebih kuat daripada negara masing-masing. Keberhasilan ASEAN di mata dunia terbukti dengan ketertarikan negara-negara besar di dunia ”

- Keith Tan

pertahanan. Pada tahun 2003, Indonesia selaku ketua ASEAN, mengusulkan gagasan tentang ASEAN Security Community sebagai tujuan yang ASEAN ingin mencapai. Gagasan tersebut menjadi benih untuk pembentukan ADMM. Pada tahun 2011, satu tahun sesudah ADMM-Plus diadakan, Indonesia mengetuai sidang 5th ADMM yang menyetujui pembentukan sejumlah ADMM-Plus Expert Working Group. Kini, keberadaan 7 Expert Working Group dalam ADMM-Plus merupakan wahana yang penting dan vibran untuk bekerjasama praktis antara militer-militer di kawasan. Harapannya Indonesia-Singapura dapat lebih mempererat persahabatan dan mencari cara untuk membangun konsensus, kerjasama praktis agar lebih tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan keamanan, teknologi, dan negara-negara besar lainnya. Pada akhir paparannya Mr. Keith menutup dengan sebuah peribahasa, "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dengan persahabatan yang erat dan abadi, baik suka maupun duka, kita akan menghadapi bersama". [VA]

Airlangga Hartarto:

Sektor Manufaktur Jadi Ujung Tombak Perekonomian Indonesia

Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Ir. Airlangga Hartarto, MMT. MBA, memberikan materi mengenai Strategi Perebutan Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Global kepada peserta PPRA LVIII di Gedung Pancagatra Lt. 3, Lemhannas RI (6/8).

Ke depannya sektor manufaktur jadi ujung tombak perekonomian Indonesia," kata Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Ir. Airlangga Hartarto, MMT. MBA, saat berikan materi mengenai "Strategi Perebutan Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Global" pada peserta PPRA LVIII di Gedung Pancagatra Lt. 3, Lemhannas RI (6/8).

Airlangga menyampaikan garis besar program pemerintah pengembangan industri terkait dengan revolusi industri 4.0. "Saat ini kita harus melihat bahwa kedepannya sektor manufaktur menjadi salah satu ujung tombak perekonomian Indonesia karena 18%-20% perekonomian Indonesia bergantung pada industri manufaktur dan ekspor 70%," ujar Airlangga.

Kebijakan suatu negara dalam mempromosikan sektor manufaktur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. Berdasarkan data UN Statistic GDP manufaktur Indonesia berada di peringkat tertinggi ke-4 di bawah Korea, Cina, dan Jerman. dengan kontribusi 22%. "Negara-negara maju saat ini banyak yang beralih ke sektor jasa, dengan demikian sektor manufaktur bagi Indonesia masih menjadi kunci sedangkan berdasarkan hasil PDB, Indonesia menjadi salah satu dari sembilan negara manufaktur dunia," jelas Airlangga.

Airlangga kemudian mengatakan jika ditinjau dari pertumbuhan sektor industri Indonesia pada triwulan I dan II masih cukup baik, namun pada triwulan II terjadi sedikit penurunan akibat efek Ramadhan dan libur lebaran yang cukup

panjang. Dapat disimpulkan bahwa pada bulan Juni Industri mengalami penurunan pada jam pabrik dari 30 hari menjadi 11 hari sehingga kuartal II terjadi sedikit penurunan namun akan naik kembali pada kuartal III. Di triwulan I beberapa industri tumbuh lebih tinggi dari pada sektor-sektor industri lainnya. Kenaikan terjadi khususnya pada mesin dan perlengkapan 14,98 %, industri makanan dan minuman 12,7%, dan industri logam dasar 9,94%.

Kontribusi industri terhadap ekspor sebesar 74% industri pengolahan dibandingkan pada tahun 2016-2017 kenaikannya 13-14%, dan jika dibandingkan dengan sektor non migas, sektor industri sebesar 90,67 %. Maka di semester berikutnya nanti akan ada kenaikan karena harga komoditas meningkat di industri-industri terkait pertambangan. Perkembangan revolusi industri 4.0 dan beberapa revolusi industri sebelumnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

"Pada revolusi industri 1.0, dunia industri dipengaruhi oleh penggunaan teknologi berbasis mesin, Alat ATBM (Alat Tenun Bukan mesin) masih digunakan terutama wastra, dan hingga saat ini pemerintah masih mendukung fasilitas tersebut dan juga alat tenun di sektor lain yang sejenis SKT (Sigaret keretek)," kata Airlangga. Menurutnya, hal tersebut dimaksudkan agar penciptaan lapangan pekerjaan dengan teknologi sederhana masih dapat diberlakukan.

Di awal abad-20 *line production* atau produksi masal pertama pada sektor otomotif ditemukan oleh Hendry Ford. Saat itu pengembangan *team model* dalam memproduksi kendaraan otomotif dengan mewarnai pesanan



“*Kedepannya sektor manufaktur menjadi salah satu ujung tombak perekonomian Indonesia*”

- Airlangga Hartarto

apapun ke dalam warna hitam, dan pada saat itu juga manufaktur belum bisa membedakan variable sehingga variable industri lebih banyak ketimbang lainnya.

Pada revolusi industri 2.0 sudah mulai membuat produksi lebih efisien sedangkan revolusi industri 3.0 mulai menggunakan teknologi informasi, elektronik, robotik, gps, dan logic control hingga tahun 2011. Revolusi industri 4.0 terjadi pada saat perubahan revolusi industri 3.0 sudah diberlakukan sehingga jumlah buruh pekerja lebih sedikit dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. "Otomatisasi dilakukan berhubungan dengan proses mesin-manusia dan yang membedakan revolusi industri 4.0 dengan lainnya adalah pemikiran AI (*Artificial*



Intelligence) komunikasi antar mesin (*communication machine to machine based on artificial intelligent*)," tambah Airlangga.

Untuk moda pekerjaan berulang mesin dapat menganalisa dengan sendiri basis-basis data. Hal tersebut merupakan revolusi industri yang paling luar biasa dibandingkan dengan revolusi-revolusi sebelumnya. Pada paparan selanjutnya Airlangga membahas implementasi kebijakan industri 4.0, Indonesia telah berhasil membangun siklus ekonomi yang sehat, sehingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. 15 tahun ke depan akan merupakan "masa emas" bagi Indonesia yang akan menikmati bonus demografi. "Making Indonesia 4.0" akan meningkatkan PDB secara signifikan, kontribusi manufaktur & menciptakan lapangan kerja. Industri 4.0 dapat merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia melalui inisiatif "Making Indonesia 4.0". Industri 4.0 akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung diantaranya revitalisasi sektor manufaktur dan meraih kembali posisi net export sedangkan dampak tidak langsungnya adalah meningkatkan kekuatan keuangan negara, meningkatkan belanja negara, meningkatkan investasi, dan

membangun ekonomi yang kokoh. Semua dampak akan mendukung dan menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih baik.

Sebelum menutup paparannya dengan sesi tanya jawab dengan peserta PPRA LVIII Airlangga menjelaskan 5 sektor utama yang telah dipilih sebagai sektor prioritas dalam "Making Indonesia 4.0" yaitu makanan & minuman, tekstil & busana, otomotif, elektronik, dan kimia. Dengan kelima fokus sektor di atas pemerintah Indonesia juga telah menetapkan 10 prioritas nasional untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Pertama, perbaikan alur aliran material dengan memperkuat produksi material sektor hulu. Contoh yang terjadi yaitu 50 persen dari bahan baku petrokimia yang masih impor.

Kedua, mendesain ulang zona industri dengan membangun peta jalan zona industri nasional misalnya industri belts, mengatasi permasalahan yang dihadapi di beberapa zona industri.

Ketiga, akomodasi standar *sustainability*. Kesempatan daya saing melalui tren *sustainability global*, contohnya yaitu EV, biofuel, energi terbarukan.

Keempat, pemberdayaan UMKM termasuk usaha mikro dengan

memberdayakan 3,7 juta UMKM termasuk usaha mikro melalui teknologi. Misalnya, *e-commerce* UMKM, pendanaan teknologi.

Kelima, membangun infrastruktur digital nasional dengan pembangunan jaringan dan platform digital. Contoh, 4G menjadi 5G, serat optik 1Gbps, *data center* dan *Cloud*.

Keenam, menarik investasi asing dengan menargetkan perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran yang menarik dan insentif untuk percepatan transfer teknologi. Tujuh, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti mendesain kembali kurikulum pendidikan menyesuaikan era industri 4.0 dan program talent mobility untuk profesional. Delapan, pembentukan ekosistem inovasi dengan pengembangan sentra *Research & Development & Design* (R&D&D) oleh pemerintah, swasta, publik, maupun universitas. Sembilan, menerapkan insentif investasi teknologi dengan memperkenalkan *tax exemption* atau subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan. Yang terakhir adalah harmonisasi aturan dan kebijakan dengan melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian. (YA)



Dr. Cho Khong Paparkan

Sky Scenario di Lemhannas RI

Chief Political Analyst Shell Scenarios Team, Dr. Cho Khong, memberikan ceramah mengenai *Sky Scenario* PT. Shell di lingkungan Lemhannas RI dan peserta PPRA LVIII di Aula Gajah Mada Lt. 3, Lemhannas RI (15/8).



Dengan menarik pelajaran dari hasil skenario Shell sebelumnya dan analisis tambahan, kami saat ini mempresentasikan suatu rute yang memungkinkan untuk mencapai tujuan Paris Agreement, termasuk net-zero emissions dari penggunaan energi hingga 2070 sebuah skenario yang disebut 'Sky'

- **Dr. Cho Khong**
Chief Political Analyst Shell
Scenarios Team

A cara diawali dengan sambutan Gubernur Lemhannas RI Agus Widjojo dan dilanjutkan dengan ceramah Dr. Cho Khong yang dimoderatori oleh Direktur Pengkajian Politik Debidjianstrat Lemhannas RI Drs. Berlian Helmy, M.Ec.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Khong menyampaikan di awal ceramahnya mengenai hubungan struktur perusahaan dan infrastruktur bangunan kantor Shell di Den Haag. "Masa depan yang kerap berubah dinamis dan tidak dapat diprediksi sebagaimana mestinya kemungkinan dapat terjadi, maka saat ini para intelektual dan ilmuwan kerap berlatih untuk menghadapi tantangan tersebut. Shell bukanlah perusahaan intelektual melainkan perusahaan bisnis. *Paris Agreement* perjanjian mengenai perubahan iklim yang disepakati pada bulan Desember 2015 merupakan dokumen luar biasa yang menawarkan blue print yang pragmatis untuk memecahkan salah satu masalah tersulit yang dihadapi masyarakat.

Untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global agar jauh di bawah 2 °C, di atas tingkatan pra-industri. Perjanjian ini menyerukan keseimbangan antara emisi antropogenik (sumber pencemar yang muncul akibat campur tangan manusia) dari berbagai sumber dan buangan melalui pengurangan gas rumah kaca dalam paruh dua abad ini," kata Cho Khong.

Menurutnya, dunia membutuhkan "keseimbangan" atau yang juga disebut sebagai "*net-zero emissions*" dalam hal sistem energi.

"Dengan menarik pelajaran dari hasil skenario Shell sebelumnya dan analisis tambahan, kami saat ini mempresentasikan suatu rute yang memungkinkan untuk mencapai tujuan *Paris Agreement*, termasuk *net-zero emissions* dari penggunaan energi hingga 2070 sebuah skenario yang disebut 'Sky'," jelas Khong.

Sky Scenario merupakan skenario terbaru PT. Shell yang menggambarkan sebuah visi masa depan ketika masyarakat bersama-sama membantu mewujudkan terciptanya dunia bebas emisi pada 2070. Skenario



" Shell telah menjadi pelopor dalam mengembangkan skenario yang digunakan untuk mengeksplorasi masa depan "

- Dr. Cho Khong

terbaru Shell tersebut bertujuan untuk memperkaya pemikiran kritis para pemimpin dan pengambil keputusan dalam memahami segala peristiwa yang mungkin terjadi dan ketidakpastian sebagai upaya mencapai dunia rendah karbon melalui *Sky Scenario*.

Sky Scenario menyatakan bahwa untuk sekedar menambah upaya saat ini tidaklah cukup. Transformasi yang relevan dalam sistem energi dan alam memerlukan penerapan teknologi baru yang disruptif dalam skala massal di lingkungan kebijakan pemerintah yang sangat mendorong investasi dan inovasi. *Sky Scenario* mengandaikan kombinasi kompleks dari fakta-fakta penggerak yang sama-sama memperkuat dan diakselerasikan dengan cepat oleh masyarakat, pasar, dan pemerintah.

"Shell telah menjadi pelopor dalam mengembangkan skenario yang digunakan untuk mengeksplorasi masa depan dan memperdalam pemikiran strategisnya selama hampir 50 tahun. Hal ini memungkinkan dilakukannya sebuah diskusi terbuka tentang upaya, tantangan dan kesempatan yang dapat digunakan oleh masyarakat, pasar dan pemerintah dalam mencapai sasaran *Paris Agreement*," jelas Khong.

Khong menjelaskan bahwa masa depan dengan *net-zero emissions* kemungkinan dapat terjadi jika para pemangku kepentingan dapat membangun kesepakatan bersama antara sektor publik-swasta, dan berkolaborasi lintas sektor baik dalam pemahaman maupun tindakan.

Melalui *Sky Scenario* ini visi Shell dapat membantu dunia, dalam mencapai *Paris Agreement* untuk menahan peningkatan suhu rata-rata bumi di bawah 2 derajat *Celsius*.

Selama lebih dari dua dekade,

telah memasukkan isu perubahan iklim. *Shell New Lens Scenario*, 'Gunung (*Mountains*)' dan 'Lautan (*Oceans*)', mengeksplorasi dua cara pandang abad ke-21. Keduanya mengambil isu-isu global yang mendesak seperti ketegangan politik, globalisasi, urbanisasi, dan aksi iklim, dan menggunakannya sebagai lensa untuk melihat bagaimana dunia bisa berkembang. Hanya saja, hasil dari dua skenario tersebut menggambarkan pencapaian *net-zero emission* di akhir abad, artinya skenario tersebut gagal mencapai sasaran suhu *Paris Agreement*.

Dr.Cho-Khong menyampaikan bahwa berdasarkan beberapa skenario Shell sebelumnya *Sky Scenario* merupakan sebuah jalur yang memungkinkan secara teknologi, industri dan ekonomi mencapai tujuan-tujuan *Paris Agreement*. *Sky Scenario* merupakan skenario yang paling optimis diyakini tercapainya emisi CO2 0% pada 2070.

"Penggunaan listrik (elektrifikasi) akan mencapai 50% dari total konsumsi energi di akhir tahun 2070. Mulai saat ini hingga 2070, tingkat elektrifikasi energi akan mencapai lebih dari tiga kali lipat, dengan jumlah pembangkit listrik global mencapai hampir lima kali lipat dibandingkan pada saat ini," katanya.

Sky Scenario juga sudah memprediksi, setengah dari total penjualan mobil global akan didominasi kendaraan listrik di awal 2030, dan ini akan terus berlanjut hingga tahun 2050 dimana semua mobil di dunia telah menggunakan energi listrik. Pada saat bersamaan, beragam sumber energi baru juga akan tumbuh hingga 50 kali lipat dengan ketersediaan energi utama berasal dari energi terbarukan.

Pada bagian akhir ceramah, Khong

menyampaikan bahwa *Sky Scenario* tidak dapat menjamin tercapainya tujuan *Paris Agreement* tanpa adanya sinergi antara masyarakat, pasar dan pemerintah. Dalam skenario ini menunjukkan bahwa berbagai perubahan penting dapat dicapai melalui langkah yang berbeda di lokasi yang berbeda.

Asistensi dalam Revisi Scenario Planning 2045

Kedatangan Dr.ChoKhong merupakan bagian dari kunjungan ke Asia Tenggara. Lemhannas RI berkesempatan mengundang Dr. Cho Khong untuk mengisi kuliah umum dan asistensi kepada tim Lemhannas RI sebagai rangkaian revisi *Scenario Planning 2045* yang akan diselenggarakan pada Oktober 2018 nanti.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Khong menyebutkan, "Skenario tidak merupakan prediksi atau perkiraan. Apa yang tim skenario lakukan adalah menjabarkan implikasi dari apa yang terjadi hari ini, apa yang kita lihat di luar jendela kita, kita mengambil implikasinya untuk masa mendatang, dan kemudian kami menyampaikannya sebagai cerita yang kami sebut sebagai skenario."

Dr. Khong juga menambahkan bahwa skenario dimulai sejak hari ini, namun skenario tersebut juga harus mencakup bahwa keadaan masa sekarang tidak statis, akan selalu bergerak dan arah pergerakannya akan menentukan seperti apa masa depan sebuah bangsa. Pada kegiatan asistensi, tim Scenario Planning 2045 diberikan kesempatan melakukan game plan (modelling) pembuatan skenario. Upaya tersebut untuk melatih tim Lemhannas RI dalam membuat suatu perkiraan, proyeksi tentang masa depan.(YA)

LAPORAN STUDI STRATEGIS LUAR NEGERI (SSLN) PPRA LVII LEMHANNAS RI

Pada 23 dan 24 Agustus 2018 lalu, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LVII menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) dari Polandia, Hungaria, Rumania dan Turki. Tujuan SSLN adalah untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam membuat kebijakan kedepannya yang merupakan program kegiatan rutin para peserta PPRA Lemhannas RI.

Tujuan SSLN adalah untuk membekali para peserta tentang kondisi objektif dari negara yang dikunjungi agar memiliki cakrawala berpikir yang komprehensif dan integral, mempertajam kemampuan dalam menemukan isu-isu strategis dan akar permasalahannya sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rumusan konsepsi strategis bagi kepentingan nasional. Tujuan dan sasaran kegiatan SSLN PPRA LVII diharapkan tercapai dengan baik. Selama kegiatan peserta melakukan kunjungan langsung ke KBRI, Kementerian, lembaga pendidikan dan industri strategis serta objek budaya yang ada di negara luar.

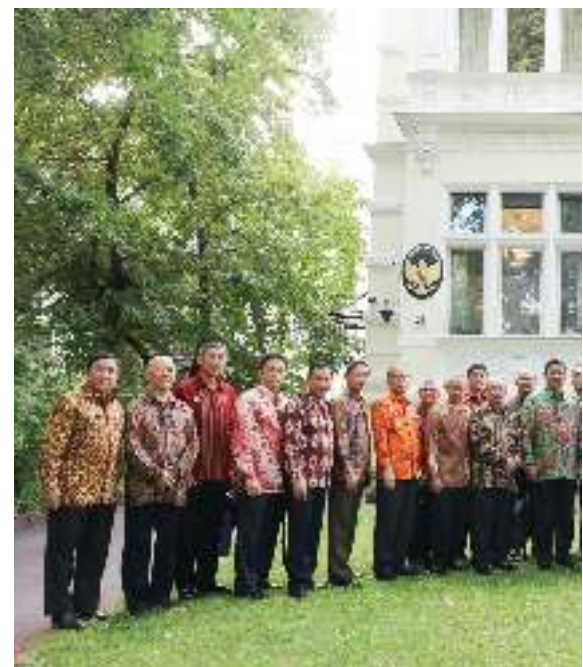
Para peserta juga dapat melihat secara langsung aktivitas obyek strategis yang dikunjungi dan diperoleh informasi akurat. Informasi tersebut di kemudian hari dapat digunakan sebagai bahan kajian strategis tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan mengenai negara yang bersangkutan. Peserta juga mendapat pengalaman yang lebih luas dan mendalam tentang penyelenggaraan pembangunan di negara tujuan sehingga dapat meningkatkan wawasan para peserta, memperluas wawasan dan

pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan seminar di akhir pendidikan.

Melalui kegiatan SSLN tersebut diharapkan dapat meningkatkan prospek hubungan RI dengan negara-negara terkait dalam perspektif pembangunan nasional. Tempat yang dikunjungi oleh PPRA LVII Lemhannas RI adalah KBRI, Instansi Pemerintahan, Pusat Turisme, dan beberapa industri strategis. Dalam kunjungan ke negara-negara tersebut, para peserta mendapatkan gambaran mengenai negara yang mereka kunjungi dalam perspektif Astagatra, sejarah pembangunan negara, serta prospek hubungan bilateral.

Selain itu, kegiatan SSLN memberikan manfaat kepada para peserta karena dapat mendengar secara langsung penjelasan dari pejabat instansi atau obyek-obyek yang dikunjungi, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan tentang perkembangan geopolitik maupun geostrategi dari negara yang dikunjungi. Di samping itu, peserta dapat memperoleh masukan dan pengalaman secara luas dan mendalam tentang penyelenggaraan pembangunan nasional negara-negara yang dikunjungi guna meningkatkan pengetahuan dan

wawasan peserta yang kelak akan berguna dalam penugasan selanjutnya sebagai kader-kader pimpinan tingkat nasional. Selain itu, peserta juga memperoleh masukan dan wawasan yang lebih luas tentang lingkungan strategis (global) guna penyusunan taskap masing-masing serta penyelenggaraan seminar akhir pendidikan.





Hungaria

Pada 23 Agustus 2018, peserta PPRA LVII menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Hungaria. Dalam paparan disampaikan mengenai kerja sama perdagangan dan investasi adalah kerja sama yang dibutuhkan oleh seluruh negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang demi meningkatkan perekonomian. Hal ini juga terlihat dari hubungan kerja sama antara Hungaria dan Indonesia. Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan yang sudah berlangsung cukup lama yaitu selama 60 tahun yang berbentuk hubungan diplomatik. Kerja sama perdagangan dan investasinya sendiri baru mulai terlihat pada tahun 2005 yang kemudian disahkan oleh Presiden SBY dalam Perpres No.15 Tahun 2013.

Adanya berbagai masalah ekonomi yang dialami kedua negara tersebut ternyata membuat ekonomi Hungaria dan Indonesia semakin kuat. Sayangnya, kestabilan ekonomi yang coba dipertahankan oleh kedua negara ini tidak berlangsung lama. Hungaria ternyata harus kembali mengalami defisit akibat krisis keuangan yang melanda Uni Eropa. Begitu juga dengan



Indonesia yang harus ikut merasakan inflasi akibat krisis tersebut. Krisis ini pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 2008 namun baru mulai menyebar ke negara-negara lain pada akhir tahun 2009. Krisis ini tentu saja mulai terdeteksi setelah jatuhnya Yunani dan beberapa negara lain yang mengalami defisit parah. Dari sini krisis ini memberikan efek domino ke hampir seluruh negara di Eropa. Bahkan berpotensi menjadi krisis global.

Dalam laporan ini, Kelompok SSLN Hungaria PPRA LVII Lemhannas RI menemukan beberapa alasan yang mendorong Indonesia dalam memperkuat kerja sama perdagangan dan investasinya dengan Hungaria. Diantaranya, karena keberhasilan Hungaria dalam mengatasi krisis keuangan di negaranya. Hal ini dilihat dari kebijakan yang dikeluarkannya yaitu menetapkan pajak di sektor keuangan, telekomunikasi dan industri ritel, mengeluarkan tarif pajak tetap sebesar 16% dari pendapatan, dan penanganan terhadap pinjaman hipotek valuta asing.

Selanjutnya, alasan Indonesia yang lain adalah karena keunggulan produk elektronik dan kekuatan pasar Hungaria. Hungaria sendiri terkenal sebagai negara pengimpor produk elektronik terbesar. Posisi Hungaria

yang berada tepat di jantung Eropa membuat Hungaria menjadi pasar paling berpengaruh di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu menjalin hubungan dengan negara yang memiliki kekuatan pasar yang sangat menonjol di Eropa. Apalagi melihat China yang merupakan penguasa pasar produk elektronik dunia saat ini, tentu saja semakin mendorong Indonesia untuk menjadikan Hungaria sebagai pasar alternatifnya agar produk Indonesia dapat bersaing di dunia internasional. Dan tentu saja Hungaria menjadi pintu masuk strategis bagi ekspor Indonesia di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang akhirnya membuat Indonesia bersedia memperkuat kerja samanya walaupun Eropa masih dalam situasi krisis dan banyak negara yang mengalami kerugian yang besar. Pada dasarnya sebagai negara yang strategis memasarkan produk di pasar Hungaria merupakan sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Tentu saja Hungaria akan mampu bangkit dari krisis karena letaknya sendiri sebagai pasar perdagangan besar di Eropa yang memungkinkan berbagai keuntungan dapat diraihinya demi kestabilan ekonomi di dalam dan luar negeri.





Rumania

Pada 24 Agustus 2018, peserta PPRA LVII menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Rumania. Berdasarkan hasil laporan paparan SSLN peserta menyimpulkan beberapa peluang Indonesia-Rumania yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kondisi geografi & SKA Indonesia, kondisi demografi Indonesia, dengan meningkatnya jumlah usia produktif “bonus demografi”, meningkatnya perekonomian Rumania peluang bagi Indonesia karena Rumania merupakan pusat utama perdagangan dunia sebagai mitra, keduanya sama-sama tertarik dalam meningkatkan pariwisata.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah mengenai stabilitas politik dan keamanan nasional yang sering terganggu oleh tindakan terorisme, berpengaruh kepada investasi, kondisi ekonomi Indonesia belum pulih berdampak pada daya saing,

jarak geografis hambatan bagi pengusaha Indonesia Rumania masih disibukkan dengan transisi politik/demokrasinya serta persoalan Krimea

Bila melihat kondisi kerjasama bilateral Indonesia-Rumania di masa lalu dan pada masa kini, maka prospek hubungan bilateral kedua negara di masa depan menunjukkan harapan yang semakin baik. Dapat dilihat dari beberapa peluang strategis di berbagai bidang seperti politik menunjukkan bahwa posisi strategis Rumania dalam *European Council EU-G20* posisi strategis Indonesia dalam ASEAN dan juga G-20. Pada bidang ekonomi Rumania membutuhkan banyak tenaga kerja adapun dalam bidang sosial dan budaya memiliki kedekatan emosional dan pada pertahanan dan keamanan posisi strategis Rumania dalam kancah EU, NATO dan teknologi.

Walaupun demikian kendala

perlu diantisipasi sebagai berikut fokus Rumania pada masalah Krimea dan perbatasan negara perlu diatasi dengan terus melakukan diplomasi, kemudian faktor letak geografis yang sangat berjauhan perlu diatasi dengan kemudahan akses/administrasi, kurangnya pengetahuan Rumania akan Indonesia perlu diatasi dengan semakin diperbanyaknya promosi, dan masih minimnya stabilitas keamanan di Indonesia masih belum menarik investor Rumania.

Pada laporan SSLN Rumania peserta memberikan saran dalam rangka mendukung hubungan bilateral Indonesia-Rumania, antara lain Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Rumania diharapkan dapat terus menguatkan peran diplomasi. Saran selanjutnya Basarnas diharapkan dapat mempelajari sistem tanggap darurat di Rumania





Turki

Pada 24 Agustus 2018, peserta PPRA LVII menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Turki. Dari Program SSLN yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 6 s.d. 9 Agustus 2018 di Republik Turki, didapatkan bahwa hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Turki semakin kuat dan memiliki prospek yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari peran masing-masing negara di kawasan. Kedekatan hubungan Indonesia dan Turki juga dapat dilihat dari adanya beberapa persamaan antara Indonesia dan Turki. Keduanya sama-sama merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sama-sama sebagai anggota G20, D8, dan OKI yang sangat aktif.

Hubungan Indonesia dan Turki semakin memperoleh dorongan yang intensif saling kunjung antara pejabat tinggi kedua negara. Tercatat beberapa sejumlah perjanjian kerja

sama antara pemerintah Turki dan Indonesia telah dilakukan. Serta kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada beberapa waktu yang lalu telah menjadi pendorong bagi munculnya kerjasama dalam berbagai aspek.

Baik Turki maupun Indonesia memiliki visi yang besar terhadap negaranya. Kedua pemimpinnya, Presiden Erdogan dan Presiden Joko Widodo memiliki visi ideal dalam memandang negaranya masing-masing. Hal ini yang membuat keduanya memiliki pengaruh yang besar khususnya di kawasan. Di satu sisi Presiden Erdogan bercita-cita membawa Turki memiliki kejayaan seperti pada masa kekaisaran Turki Ustmaniyah, dan di sisi yang lain Presiden Joko Widodo memiliki Visi Poros Maritim Dunia yang pada masa Kerajaan Majapahit pernah kurang lebih sama-sama menguasai kemaritiman.

Selain itu, Turki dan Indonesia kini sama-sama menganut sistem presidensial.

Kesamaan ini dapat menarik keduanya semakin mendekat dalam kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang lebih erat. Hal ini tentu semakin mendekatkan Turki dan Indonesia kepada persamaan dalam hal sistem pemerintahan dan sistem politik. Sistem politik Turki yang semakin demokratis juga membawa kesamaan.

Dalam hal perekonomian, Perjanjian IT-CEPA yang melibatkan Turki dan Indonesia adalah salah satu progres signifikan yang menambah eratnya hubungan bilateral Turki dan Indonesia. Kedua negara memfokuskan IT-CEPA dalam lima bidang utama yakni energi listrik, perdagangan, dirgantara, industri pertahanan, dan penanggulangan terorisme. Dapat dikatakan kelima bidang tersebut seluruhnya berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Turki dan Indonesia juga mempromosikan nilai-nilai sosial. Di dalam forum OKI (Organisasi Konferensi Islam), Turki dan Indonesia menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan Yerusalem sebagai ibukotanya. Di dalam forum D-8 Turki dan Indonesia bersama dengan Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, dan Pakistan bertujuan memajukan negara-negara dengan status berkembang dan dengan mayoritas penduduk muslim. Selain itu keduanya juga bergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia).

Demi mendorong modernisasi



alutsista Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri melakukan kerjasama dengan industri pertahanan negara lain. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia lewat PT.PINDAD dalam mengembangkan dan membuat tank medium yang dilakukan bersama FNSS Defense Systems Turki. Kerjasama industri pertahanan antara Turki dengan Indonesia ini dilakukan karena kedua negara dianggap dapat memahami kepentingan satu sama lain. Kerjasama industri pertahanan yang ingin dikembangkan antara lain adalah produksi peralatan militer dibidang tertentu yang disepakati antara kedua pihak dan transfer teknologi peralatan militer.



Polandia



Pada 24 Agustus 2018, peserta PPRA LVII menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Polandia. Hubungan diplomatik RI Polandia dibuka pertama kali pada tahun 1955 dan telah berjalan dengan baik tanpa adanya masalah dan hambatan yang berarti serta menunjukkan kecenderungan peningkatan. Polandia menilai bahwa Indonesia memiliki peranan dan pengaruh yang besar dalam tatanan internasional terutama di kawasan ASEAN dan juga dalam organisasi-organisasi besar lainnya seperti PBB, G-20 dan APEC.

Pemerintah Polandia secara resmi merilis *Defense White Book* (DWB) yaitu Buku Putih Pertahanan pertama pada tahun 2013, yang ditujukan kepada semua struktur negara nasional dan global. Tujuan buku ini adalah untuk menjelaskan secara lebih terperinci tentang kebijakan pertahanan Polandia, yang mencakup bagaimana Polandia mendefinisikan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) sebagai dampak dari lingkungan geopolitik dan geostrategis. Definisi tersebut kemudian disesuaikan dengan kepentingan nasional dan akan menghasilkan kebijakan untuk menanggapi isu-isu tertentu dan para pelaku yang terlibat yang dapat

mengancam keamanan nasional atau membantu mencapai tujuan nasional.

Polandia yang berada di tengah negara-negara Eropa (Jantung Benua Eropa) membuat posisi Polandia menjadi penghubung Eropa Barat dengan Eropa Timur. Dengan posisi geografis tersebut membuat Polandia menjadi pintu masuk ke Eropa Timur yang merupakan negara-negara bekas komunis. Polandia dapat memanfaatkannya dengan menjadi *hub* (pintu gerbang). Namun sisi negatifnya adalah posisi ini menjadikan Polandia sebagai tanah perebutan kekuatan-kekuatan besar di sekitarnya.

Polandia kekurangan jumlah penduduk bila dibandingkan dengan proporsi luas wilayahnya, dari 37,9 juta jiwa yang ada 26 juta diantaranya adalah diaspora dari negara-negara sekitar Polandia. Di sisi lain ada kekhawatiran terhadap imigran Ukraina terkait dengan paham (ideologi) dan penyakit yang kemungkinan dapat terbawa ke Polandia.

Untuk mengatasi tren penurunan penduduk, maka pemerintah Polandia memiliki kebijakan dengan memberikan insentif bagi keluarga yang memiliki lebih dari 2 anak mendapat insentif sebanyak 200 PLN per bulan per anak, tetapi walaupun tidak memiliki lebih dari 2 anak dan tergolong masyarakat miskin tetap mendapatkan



yono/dok.humas/lri

insentif dari negara. Polandia sangat kaya dengan sumber daya batu bara. Polandia memiliki cadangan batu bara yang dapat mendukung Eropa selama 200 tahun. Saat ini Polandia belum mengeksplorasi batu baranya, untuk kebutuhan dalam negeri memanfaatkan batu bara dengan cara impor dari Rusia. Kebijakan tersebut sesuai ketetapan Uni Eropa untuk memelihara sumber kekayaan alam dalam negeri serta sesuai dengan teori dari Lewis yang mengatakan bahwa semua sumber daya alam seperti fosil tidak dapat diperbaharui dalam waktu cepat. Polandia semula sebagai negara komunis dan tergabung dalam pakta Warsawa. Kini Polandia adalah negara beragama dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Katolik, Kristen Ortodoks dan menjadikan Kristen sebagai identitas Eropa. Menurut Polandia, Eropa tanpa kekristenan akan menghilangkan identitas Eropa.

Dalam aspek politik luar negeri, Polandia memiliki sejarah pendudukan oleh komunisme, kebudayaan, dan ideologi yang berganti. Hal tersebut membentuk identitas negara tersebut sedikit berbeda dengan identitas mayoritas negara-negara Uni Eropa, dan menyebabkan Polandia terlihat kurang nyaman dengan Uni Eropa meskipun Polandia tersebut bagian dari organisasi

multilateral tersebut. Di sisi lain Polandia saat ini relatif merupakan negara yang religius dan menjunjung tinggi keluarga, hal yang kurang dimiliki oleh negara-negara lainnya di komunitas Uni Eropa. Sebaliknya, bila dibandingkan Indonesia sebagai anggota kawasan ASEAN, negara-negara di ASEAN berprinsip pada "ASEAN WAY", yakni masing-masing negara tidak boleh mencampuri keputusan sebuah negara. Hal tersebut, membuat negara-negara anggota ASEAN menghormati satu sama lain, meskipun ASEAN masih membentuk identitas kawasan dan relatif lebih beragam dibandingkan organisasi multilateral Uni Eropa. Akan tetapi, Polandia maupun Indonesia memiliki kesamaan sebagai negara demokrasi yang berada di persimpangan kekuatan-kekuatan dunia yang saling berkompetisi. Polandia sebagai pioner demokrasi di kawasan Eropa Timur dapat menjadi mitra bagi Indonesia dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Dalam hal pengembangan demokrasi, kedua negara sama-sama memiliki peran sebagai pionir demokrasi di kawasan masing-masing, Polandia di Eropa Timur dan Indonesia di ASEAN.

Di Polandia, bidang pertanian dianggap lebih dekat dengan kemiskinan, sehingga sulit mendapatkan masyarakat Polandia menjadi petani. Oleh sebab

itu, pertanian di Polandia dibuat sebagai sebuah industri. Pertanian Polandia mendukung kebutuhan Eropa. Meskipun tidak sebaik negara Jerman atau Perancis, pertumbuhan ekonomi Polandia stabil dan pada posisi paling tinggi di Eropa. Negara tersebut relatif stabil saat menghadapi krisis pada tahun 2008-2009.

Di Polandia dikenal dengan istilah "pengangguran suka rela", yakni pengangguran yang terjadi karena masyarakat Polandia yang berpendidikan tinggi tidak mau bekerja di tempat yang bergaji rendah, sehingga membuat mereka pergi ke luar Polandia. Ancaman yang diantisipasi oleh Polandia diantaranya adalah cyber, hibrid, disinformasi, Brexit, imigrasi tidak terkontrol, serangan teroris, masalah demografi, perencanaan strategis (tumpang tindih terkait dengan dokumen yang ada), kompetisi AS, Rusia dan Cina, Nuklir Korea Utara (Polandia memberikan perhatian besar terhadap nuklir Korea Utara karena Polandia masuk kedalam komisi pengawasan *The Neutral Nations Supervisory Commission* (NNSC) bersama dengan Ceko, Swedia dan Swiss. Di tempat lainnya, UE, agresifitas nuklir Iran, perhatian ke LCS karena sebagai lalu lintas perdagangan terbesar di dunia sehingga menjadi perebutan negara besar, juga dijadikan perhatian serius oleh negara Polandia. (YA/END)



FGD Bahas Antisipasi Dampak Negatif Aksi Intoleransi Umat Beragama

Agama merupakan pembawa risalah yang berisi tuntutan Tuhan yang Satu. Kebutuhan hubungan manusia dengan tuhan merupakan kebutuhan paling mendasar manusia"

- Prof. Dr. der Sos. Gumilar Rusliwa Somantri

Kedeputan Bidang Pengkajian Strategik (Debidjianstrat) Direktorat Pengkajian Hankam Lemhannas RI mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bertemakan "Antisipasi Dampak Negatif Aksi Intoleransi Umat Beragama Guna Menjaga Harmoni Sosial Dalam Rangka Ketahanan Nasional", Rabu (15/8)

Kedeputan Bidang Pengkajian Strategik (Debidjianstrat) Direktorat Pengkajian Hankam Lemhannas RI mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bertemakan "Antisipasi Dampak Negatif Aksi Intoleransi Umat Beragama Guna Menjaga Harmoni Sosial Dalam Rangka Ketahanan Nasional", Rabu (15/8) dengan narasumber Irjen Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si (Kasatgas Nusantara) dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., CBE. (Ketua Dewan Setara Institute).

Sebagai pengimbang opini dihadirkan pula empat orang pembahas yakni Prof. Dr. der Soz, Gumilar Rusliwa Somantri (Guru Besar Sosiologi UI),

Drs. Ferimeldi, Ph.D. (Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama), dan Ibu Yenny Wahid (Direktur Wahid Foundation) dan Priya Jarkasih, S.E., M.Sc.sebagai notulensi FGD.

Irjen Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si. memaparkan bahwa keadaan masyarakat *low class* berpikir tidak kritis dan tidak rasional karena keinginan mereka adalah ingin merubah revolusi industri 4.0 yang dulu disampaikan melalui pidato ceramah dan sekarang masuk ke ruang-ruang privat media sosial, hal tersebut mempengaruhi kebebasan berpikir. "Perkembangan ajaran transnasional yang demikian cepat mempengaruhi pemikiran sehingga mayoritas menjadi *silent identity* yang mengakibatkan demokrasi



legislatif menguap di media dan berubah menjadi *civil society* yang menguat,” kata Gatot Eddy.

Pengaruh cepat dari pola berpikir masyarakat tentang isu sensitif intoleransi yang dibahas di sosial media menjadi sarana instan yang kurang tepat dan kurang bijak dikonsumsi tanpa filter. “Media sosial sangat berpengaruh terhadap intoleransi media sosial cepat masuk dalam ruang berpikir individu terkait perbedaan agama dalam membangun rumah peribadahan. Ketika intoleransi dibiarkan maka akan menjadi toleran dalam melakukan langkah-langkah radikal untuk mencapai tujuannya dan jika dibiarkan maka akan menjadi bibit terorisme,” kata Gatot Eddy.

Oleh sebab itu, menurut Gatot, harus dicari akar permasalahan penyebabnya intoleransi dengan penegakan hukum yang dilakukan di lapangan maupun yang di media sosial. Media sosial adalah tantangan terberat karena mempunyai medianya sendiri, redaktornya sendiri, reporternya membuat berita sendiri, sampai editor sendiri sehingga tidak ada filter. Ditambah lagi masyarakat mempunyai satu kebiasaan yang membanggakan sebagai orang pertama yang meng-*share* berita tersebut ke sosial media untuk pertama kalinya.

Dalam FGD sempat disinggung pula terkait permasalahan intoleransi pemahaman-pemahaman ini jika dibiarkan dapat menjadi bibit

radikalisme yang berpotensi terorisme. “Jika dikaitkan dengan isi keberagaman masyarakat dan struktur masyarakat yang didominasi oleh *low class* demokrasi yang tengah bertransisi menuju konsolidasi demokrasi tentunya ini merupakan potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan mereka dengan menggunakan *in the name of religion* dan mengatakan bahwa mereka yang paling benar,” kata Gatot Eddy.

Bukan hanya antar umat beragama tetapi intra agama juga ada masalah intoleransi. Permasalahan makin serius ketika berita berasal dan didominasi oleh berita-berita *hoax* yang terkapitalisasi di media sosial. Dalam penegakkan dalam permasalahan terkait Satgas Nusantara sudah bekerja sama dengan kominfo mengupayakan bagaimana membuat literasi digital, untuk itu anggota Binmas kami dididik selama 2 hari oleh kominfo, supaya dapat menginformasikan kepada masyarakat untuk tidak mudah *share* berita *hoax*, berita berita terkait ujaran kebencian dan terkait isu sara.

Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., CBE. secara umum memaparkan adanya kasus-kasus intoleransi, ekstrimisme, radikalisme terutama intoleransi dan radikalisme yang bersifat kasuistik, sejak abad 12 tidak ada perang agama yang terjadi di Indonesia namun pada akhirnya pada tahun 1999 terjadi di Ambon konflik komunal antara Islam dan Kristen meletus dalam kurun waktu

hanya 3 tahun dengan konflik yang tidak menyebar ke tempat-tempat lain.

Berbeda jika dibandingkan dengan sejarah Eropa yang berdarah-darah, perang antar gereja hingga saat ini pun belum rukun menemukan titik damai. Azra menyebutkan, “Menurut Romo Masnun, di Rusia bahwa orang Katolik selalu ditindas di Rusia ini oleh Gereja Ortodoks dan terutama Ortodok Rusia.” Dari perbandingan tersebut, disimpulkan Indonesia tidak punya sejarah demikian berkepanjangan. Dengan persatuan dan toleransi Indonesia dapat menemukan titik damai dalam persatuan perbedaan karena masyarakat Indonesia berpikir proposional dan tidak membesarkan konflik permasalahan namun tetap waspada.

Menurut beberapa lembaga dalam melihat kasus-kasus intoleransi pada skala *and more assessment* harus dilakukan indikator assesmen tiap tahun untuk menemukan kecenderungannya karena dalam 4 tahun ini kasus intoleransi menurun, kasus-kasus intoleransi dilihat dari tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 pada era Presiden Jokowi. “Saya melihat ada dua faktor kenapa menurun. Yang pertama, kebijakan pemerintah sekarang lebih tegas, buktinya mengeluarkan Perpu no 2 tahun 2017 pemerintah yang dulu tidak berani mengeluarkan itu,” jelas Azra.

Azra juga menegaskan beberapa poin secara umum agar tidak perlu terlalu khawatir keadaan yang ada, karena Polri sudah tegas dan lembaga-lembaga LSM-LSM yang selalu mengingatkan seperti yang dipimpin oleh Ibu Yeni Wahid, yang menyebarkan pesan-pesan damai, pesan-pesan anti radikalisme, jadi diharapkan harus konsolidasikan semua dengan penanganannya yang komprehensif. Masyarakat juga harus ikut terlibat andil menertibkan ceramah-ceramah di masjid, rumah ibadah dan di tempat-tempat lain. Perlu diusulkan kepada kementerian agama agar penceramah itu diberikan sertifikasi mengenai materi subjek-metodenya agar tidak sampai keluar dari konteks kebaikan.

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri menyebutkan bahwa para tokoh agama, elite, politik, pengajar,





pendidik, dan para orang tua perlu memiliki cara pandang yang berkeadilan sosial. Menurutnya, sifat berkeadilan sosial merupakan sifat yang telah ada pada diri manusia. "Agama merupakan pembawa risalah yang berisi tuntutan Tuhan Yang Satu. Kebutuhan hubungan manusia dengan Tuhan merupakan kebutuhan paling mendasar manusia. Untuk itu, ketika terjadi konflik pada institusi politik, maka sesuai dengan tuntutan ilahiyah, manusia perlu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut."

Drs. Ferimeldi, Ph.D. (Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama) mengatakan, "Di Indonesia bukan persoalan yang terlalu ditakutkan berdasarkan pengalaman kami dengan FKUB-FKUB di tingkat kabupaten kota. Berdasarkan data yang kami miliki data tensi atau insiden yang paling banyak terjadi memang berkaitan dengan rumah ibadah."

Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini selain melakukan dialog adalah menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan ke pemerintah daerah jadi ada pengaman ketika masyarakat merasa terganggu urusannya dengan agama bisa menyampaikan kepada FKUB dan yang terakhir dia juga bertugas mensosialisasikan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan urusan agama,

juga m e m b e r i k a n rekomendasi terkait dengan pendirian rumah ibadah. Ferimeldi juga menyebutkan, "Saat ini kita bekerja bagaimana mengatasi generasi muda supaya tidak terkena radikalisme, kami tidak hanya bekerja sendiri kami beberapa kali minta bantuan Densus 88 bagian divisi pencegahan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah radikalisme."

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa generasi muda perlu diberikan lagi tentang pengajaran Pancasila, agar para pemuda paham bahwa pendirian Negara Islam itu sesuatu yang selalu dilarang. "Saya berharap kajian Lemhanas ini juga merekomendasikan pada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang lebih kuat tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kementerian Agama kami mendiskusikan tentang RUU perlindungan umat agama," kata Ferimeldi.

Yenny Wahid Direktur *Wahid Foundation*, mengatakan sangat menarik menggarisbawahi intoleransi, radikalisme itu bukanlah persoalan agama, "Ini masalah *attitude*, jadi memang agama punya peran dalam menjadi *trigger* atau menjadi

memberikan *legal standing*, basis legal untuk tindakan-tindakan radikal."

Retorika dibangun, rasa takutnya, dibangun ketakutan itulah yang memicu orang melakukan tindakan radikal itu adalah alasan salah satunya. Bicara tentang intoleransi, setiap negara pasti mempunyai kelompok-kelompok yang tidak disukainya, yang kemudian kita ukur sebagai level toleransi di sebuah negara, kalau dalam survei kami kelompok yang paling tidak disukai di Indonesia, tahun 2016 yang pertama kelompok yang paling tidak disukai adalah LGBT, yang kedua Komunis, yang ketiga Yahudi.

Di akhir FGD Yenny menambahkan opininya mengenai fiqih, "Saya hanya ingin menambahkan tentang fiqih, kenapa sih fiqih tidak dapat menyelesaikan persoalan kita, fiqih malah bisa membuat persoalan kebangsaan lebih parah, kenapa kalau dilihat dari sudut pandang agama maka agama kita yang paling benar. Setiap agama pasti beranggapan agamanyalah yang paling benar, kalau ini kemudian diterjemahkan dalam kebijakan negara maka yang terjadi adalah diskriminasi terhadap orang-orang yang berbeda agama, sehingga fiqih bukan hanya tidak bisa menyelesaikan persoalan negara tetapi bisa jadi menghambat terciptanya suasana yang bebas dari dikriminasi dan intoleransi." (YA)



Menko Kemaritiman Berikan Kuliah pada Peserta PPRA LVII dan LVIII

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Jenderal TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan berikan kuliah pada Peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII di Ruang Gajah Mada, Lemhannas RI (2/8). Dalam kesempatan tersebut Luhut Panjaitan bawakan materi mengenai “Membangun Ketahanan Indonesia dengan Poros Maritim Dunia”.

Di awal paparan, Luhut Panjaitan memaparkan mengenai konteks poros maritim dunia. Indonesia adalah negara kelautan terbesar (*the largest archipelagic state*) dan merupakan wilayah perairan tersibuk (*the busiest trade waterways*). Setidaknya setiap tahun 56 persen perdagangan dunia melewati tiga wilayah Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Perdagangan tersebut mencapai nilai sebesar 435 juta dollar AS,” kata Luhut. Selain sebagai jalur tersibuk, secara sosio-ekonomi, Indonesia merupakan wilayah yang sangat menarik di mata dunia. “Indonesia adalah satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara. Selama sepuluh tahun, pertumbuhan rata-rata Indonesia mencapai 5,7 persen, padahal ekonomi dunia sedang melesu. Di tengah kelesuan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh dan diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di tahun 2050,” kata Luhut Panjaitan.

“Saat ini dunia sedang berubah, kekuatan Amerika Serikat perlahan menurun sementara China menguat. Di sisi lain, Eropa sedang mengurus permasalahan internal mereka, seperti Brexit juga migrasi penduduk. Dunia kini juga tengah dihadapkan oleh meluasnya konflik di Timur Tengah,” kata Luhut Panjaitan.

Dengan begitu strategisnya letak dalam posisi dunia serta untuk

mencapai visi menjadi Poros Maritim Dunia, Indonesia perlu membangun pondasi perekonomian yang baik. “Indonesia telah memulai dengan baik, di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik. Total Hutang Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata negara tetangga apabila dibandingkan dengan proporsi terhadap Produk Domestik Bruto,” kata Luhut Panjaitan.

Secara umum, Indonesia masih tetap menjadi pilihan utama bagi investor asing. Hal tersebut terlihat bahwa secara peningkatan investasi, Indonesia mengalami peningkatannya bila dibandingkan India, Malaysia, Filipina, dan Thailand. “Ada sekitar 381 kontrak/projek dengan 244 perusahaan,” kata Luhut Panjaitan.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun ketahanan Indonesia dengan Poros Maritim Dunia yaitu dengan meningkatkan investasi di sektor maritim. “Pemerintah melakukan peningkatan investasi sektor maritim, dengan mengoptimalkan SDA dan pengembangan SDM,” kata Luhut Panjaitan. Sektor maritim berkontribusi terhadap PDB sebesar 749,9 triliun (atau sebesar 6,04 persen), dengan kemampuan menyerap tenaga kerja sebanyak 3,6 juta orang, dan ekspor dagang bidang maritim mencapai 12,5 miliar dollar AS.

Pariwisata (pariwisata laut) diproyeksikan menjadi sumber utama

pemasukan nasional. “Enam dari sepuluh destinasi wisata baru di luar Bali merupakan destinasi wisata laut. Kampanye *branding* yang kuat menargetkan 20 juta turis/ahun. Komitmen investasi publik yang kuat bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur untuk pelayanan publik, transportasi dan komunikasi,” kata Luhut di hadapan para peserta.

Luhut juga menyebutkan bahwa potensi ekonomi maritim Indonesia sangat besar, namun sayangnya pemerintah terlambat untuk menyadarinya. Ia menyebutkan, potensi ekonomi maritim yang ada di lautan yang bisa dieksploitasi yakni mencapai USD1,33 triliun per tahun atau mencapai Rp17,69 triliun (kurs Rp13.300 per USD). Angka tersebut terdiri dari sektor pertambangan dan energi USD210 juta, agrikultural USD210 juta, industri jasa maritim USD200 juta, sumber daya nonkonvensional USD200 juta, dan industri bioteknologi USD180 juta.

Kemudian sumber daya pulau-pulau kecil USD120 juta, industri pengolahan ikan USD100 juta, wisata bahari USD60 juta, transportasi laut USD30 juta, hutan mangrove USD8 juta, serta perikanan tangkap USD12 juta. “Tapi sekarang yang terasa baru 8-9 persen,” kata Luhut. Sebab, sejak kemerdekaan, barulah pada 2014 pemerintah sadar dan mendeklarasikan poros maritim. Dirinya pun mengakui bahwa ia sendiri terlambat menyadari bahwa sebenarnya ada potensi yang besar dari bidang maritim. (ENDAH)

Respon TNI Hadapi Pergeseran Geopolitik Kawasan

Tidak dapat dipungkiri situasi lingkungan strategis kawasan di sekitar Asia Tenggara mengalami perubahan pasca kebijakan ekspansif China dengan *Belt and Road Initiative* (BRI) dan respon Amerika Serikat yang mengkampanyekan arsitektur kawasan baru yaitu Indo-Pasifik.

Asia Tenggara mempunyai posisi sentral sekaligus menjadi ruang perebutan pengaruh karena posisinya yang menghubungkan kawasan Pasifik dan kawasan Samudera Hindia, termasuk Indonesia yang menjadi jalur pelayaran persilangan antara dua kawasan tersebut. Ruang maritim ini menjadi keunggulan kompetitif sekaligus tantangan di sektor politik luar negeri, ekonomi, dan terutama pertahanan – keamanan yang menentukan stabilitas kawasan dan pemeliharaan kedaulatan Indonesia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M. dalam ceramahnya di depan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII, Senin (23/7), di Lemhannas RI menyampaikan bagaimana TNI, sebagai alat negara di bidang pertahanan-keamanan, merespon pergeseran geopolitik kawasan ini.

Pergeseran dinamika di kawasan seputar Samudera Pasifik dan Samudera Hindia tak ayal mengubah peta politik kawasan yang diwarnai oleh perebutan

pengaruh di antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, India, Jepang, Australia, dan juga Rusia. Negara-negara yang merasa “terancam” berupaya untuk membendung pengaruh Tiongkok yang meluaskan pengaruh kawasan dari Asia Tenggara hingga ke Asia Selatan dan benua Afrika dengan membentuk poros *quadrennial strategic linkage* (dikenal dengan sebutan quad) yaitu Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India dengan konsep Indo Pasifik. Meskipun masih baru, pemerintah Donald Trump terus mempopulerkan konsep ini dan menjadikannya sebagai kebijakan politik luar negeri.

Situasi kawasan yang cukup memanas ini tentu menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas kawasan, terutama di Asia Tenggara. “Seperti yang diketahui bersama, kawasan Asia Pasifik dan Samudra Hindia merupakan kawasan yang dinamis dengan berbagai isu keamanan seperti konflik Laut China Selatan, kepemilikan nuklir Korea Utara, India, dan Pakistan, serta kecenderungan perlombaan peningkatan anggaran pertahanan dan persenjataan” menurut

“
Kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia merupakan kawasan yang dinamis dengan berbagai isu keamanan”

-Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.

Siwi Sukma Aji. Pelanggaran wilayah sering terjadi di negara-negara yang berbatasan dengan laut, khususnya di Laut China Selatan. “Belum lagi adanya ancaman radikalisme, terorisme, penyelundupan, dan serangan siber yang menjadi musuh bersama negara-negara,” ungkap Siwi Sukma Aji di hadapan para peserta PPRA LVIII. Dengan kondisi ini, pemeliharaan

stabilitas kawasan mutlak diperlukan.

Respon TNI

TNI sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, adalah alat negara di bidang pertahanan dan keamanan. Merespon adanya perubahan dinamika geopolitik kawasan yang berpengaruh langsung pada kedaulatan dan pertahanan nasional, TNI harus mampu menciptakan daya getar sehingga tidak diremehkan oleh negara lain. “Panglima TNI telah mengeluarkan 11 prioritas kebijakan TNI yang menjadi fokus kita saat ini,” ujar Siwi.

Kesebelas program prioritas tersebut yaitu revitalisasi program-program *Minimum Essential Force* (MEF); penyempurnaan doktrin TNI dan doktrin angkatan; penyempurnaan organisasi TNI; pengembangan sistem pengelolaan SDM TNI yang berbasis kompetensi; pembangunan TNI AD menjadi kekuatan terpusat, kewilayahan dan pendukung; pembangunan TNI AL melalui penyusunan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) terdiri atas kapal perang, pesawat udara, marinir dan pangkalan; pembangunan TNI AU untuk mencapai *air supremacy* atau *air superiority*; pembangunan unit khusus yang terdiri dari pasukan-pasukan khusus trimatra; pengembangan sistem operasi trimatra yang berbasis teknologi yang meliputi *Network Centric Warfare*, C4ISR dan *Cyber Warfare*; penguatan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi dalam rangka memenangkan kepentingan nasional; dan mewujudkan sistem pengadaan alutsista yang berpedoman pada *effect based* dan interoperabilitas yang dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bebas dari KKN.

Untuk mencapai kesebelas program

prioritas tersebut, pembangunan kekuatan TNI dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan ancaman, pendekatan kapabilitas, dan pendekatan anggaran. Gabungan ketiga pendekatan ini merupakan upaya untuk mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Dengan anggaran pertahanan yang terbatas, diperlukan upaya untuk menghadapi ancaman yang ada dan peningkatan kapabilitas, sehingga lahir konsep MEF. Revitalisasi program MEF dilaksanakan dengan mendorong pertumbuhan industri pertahanan nasional (Idahan) untuk menyediakan alutsista yang mendukung kapabilitas TNI.

Penyesuaian Strategi Militer

Tidak hanya pada tingkatan kebijakan pertahanan, seperti yang disebutkan dalam program prioritas Panglima TNI, strategi militer TNI juga memerlukan penyesuaian dengan melakukan penyesuaian gelar kekuatan. Tidak tanggung-tanggung, dibentuk 3 komando utama operasi (kotamaops) di wilayah timur untuk pemerataan, yang sebelumnya lebih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2018, dibentuk Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis TNI AD di Gowa, Komando Armada III di Sorong, dan Komando Operasi TNI AU III di Biak. Selain ketiga kotamaops, dalam Kepres tersebut juga disebutkan pembentukan Pasukan Marinir 3 di Sorong.

TNI juga membentuk komando gabungan dan komando kewilayahan. Komando gabungan merupakan komando fungsional atau komando operasi khusus seperti Satuan 81/Gultor Kopassus (SAT-81 Kopassus, detasemen khusus penanggulangan teror), Detasemen Jalamangkara (Denjaka,

penanggulangan teror aspek laut gabungan pasukan Komando Pasukan Katak/Kopaska dan Batalyon Intai Amfibi Korps Marinir), Satuan Bravo 90 (Satbravo 90, satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas/ Kopaska untuk intelijen dan penganggulangan teror aspek udara). Menurut Siwi Sukma Aji dalam ceramahnya di depan peserta PPRA LVII komando pasukan khusus gabungan yang memiliki keunggulan kecepatan, kejutan, dan daya hancur untuk menanggulangi sasaran terpilih di dalam maupun luar negeri

Siwi juga mengungkapkan adanya komando kewilayahan yang diberi nama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). “Kogabwilhan ini, komando gabungan 3 matra untuk melaksanakan OMP (Operasi Militer Perang) & OMSP (Operasi Militer Selain Perang)”, jelas Siwi.

Pada akhir ceramahnya, Siwi Sukma Aji mengungkapkan bahwa TNI juga telah membuat program Pangkalan TNI Terpadu. “Pangkalan ini nantinya menjadi pangkalan aju untuk mendukung *power projection*. Konsep kapal induk statis. Melibatkan komponen TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan dilengkapi dengan sistem pengendalian operasi TNI (sisdalops)”, ujarnya secara detail kepada peserta PPRA LVIII.

Pangkalan TNI terpadu ini dibangun untuk mendukung operasional pelaksanaan Kogabwilhan. TNI telah menentukan sejumlah titik yang akan menjadi pangkalan aju yaitu Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak, dan Merauke. Rencananya pembangunan titik-titik pangkalan aju ini akan diselesaikan hingga tahun 2024. Hingga 2018 ini, pangkalan aju yang telah dibangun yaitu pangkalan di Natuna. (nimade)





PPRA LVII Resmi Ditutup

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo secara resmi menutup rangkaian kegiatan Program Pendidikan Reguler Angkatan LVII di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Jakarta (20/9). Dalam Upacara Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan LVII tahun 2018 tersebut Agus Widjojo mengucapkan selamat atas keberhasilan para alumni dalam menyelesaikan tugas belajar.

“Hari ini, tentu merupakan hari yang membahagiakan sekaligus membanggakan bagi para alumni PPRA LVII beserta keluarga sekalian, yang telah berhasil menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Lemhannas RI. Perkenankan seluruh jajaran lembaga untuk turut berbagi rasa bahagia yang dirasakan oleh seluruh keluarga alumni PPRA LVII, dan mengucapkan selamat atas berhasilnya para alumni menyelesaikan tugas belajar dalam PPRA LVII ini. Para peserta PPRA LVII kini sah meninggalkan predikat peserta dan menggantikannya dengan predikat alumni Lemhannas RI,” kata Agus Widjojo.

“Saya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga saya kepada para alumni PPRA LVII sekalian yang telah menunjukkan dedikasi, kesabaran, kesungguhan, ketekunan, kekompakan dan komitmennya selama pendidikan berlangsung hingga berakhirnya rangkaian pendidikan pada pagi hari ini,” kata Agus Widjojo. Sebagai puncak kegiatan, para alumni telah menyumbangkan pemikirannya melalui

seminar dengan tema “Penataan Partai Politik untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”. Melalui seminar tersebut para alumni telah merumuskan konsepsi pemikiran alumni PPRA LVII, terkait penataan partai politik untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Agus Widjojo juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI menaruh harapan besar kepada seluruh alumni PPRA LVII untuk mampu mengimplementasikan seluruh ilmu, pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama pendidikan melalui pemahaman dan cara berpikir holistik, komprehensif, integral dan sistemik sebagaimana para alumni pelajari dan gunakan selama pendidikan. bekal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan sesuai dengan penugasan di lingkungan kerja masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Agus Widjojo mengingatkan dan menekankan kembali beberapa hal penting kepada seluruh alumni PPRA LVII:

Pertama, para alumni PPRA LVII yang merupakan kader pimpinan tingkat nasional, harus mampu menjadi contoh, panutan, teladan bagi masyarakat dengan pola pikir, pola sikap dan pola

tindak yang konsisten dan selaras dengan konsensus dasar bangsa yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, tingkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan di lingkungan masing-masing dengan tetap berpedoman pada enam bidang studi inti Lemhannas RI.

Ketiga, menjelang bergulirnya tahun politik, yakni pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019, para alumni diharapkan tetap meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap perkembangan kondisi kehidupan nasional, tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik dalam skala nasional, regional maupun global.

Keempat, jaga nama baik almamater. Kebanggaan almamater hanya terletak pada karya alumninya bagi pembangunan bangsa dan negara. lembaga berharap tali silaturahmi antara para alumni dan lembaga tetap dijaga karena hanya dengan mendapat masukan dari para alumni, lembaga dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

CAPAIAN TERBAIK ALUMNI PPRA LVII

1. **Komisaris Besar Polisi Priyo Waseso, S.Si., M.P.P.** - meraih capaian nilai akademik terbaik.
2. **Kolonel Infanteri Hadi Basuki, S.Sos., M.M., M.Tr.(Han).** - meraih capaian nilai kertas karya ilmiah perseorangan terbaik
3. **Colonel Ibrahim Bin Yasir dari malaysia** - meraih capaian nilai akademik terbaik peserta negara sahabat.

PPRA LVII Selenggarakan Seminar Nasional “Penataan Partai Politik untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”

Dalam praktik presidensial multipartai di Indonesia, potensi terganggunya efektivitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari pasang surut relasi antara badan legislatif dan badan eksekutif sebagai konsekuensi dari munculnya pemerintahan minoritas (*minority government*) yang tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas dari parlemen.

Melihat dinamika yang ada, maka PPRA LVII menyelenggarakan Seminar Nasional “Penataan Partai Politik untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia” di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Jakarta (13/9). Seminar tersebut menghadirkan keynote speaker yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Akademisi Prof. Dr. Jimly Asshiddique, S.H., dengan pembahas dari Universitas Airlangga Prof. Drs. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D., anggota Komisi II DPR RI Zainudin Amali, S.E., serta sebagai penanggap ahli dari LIPI Prof. Dr. Syamsudin Haris, M.Si., Pansus UU Politik Dr. Ir. Muhammad Lukman Edy, M.Si., Guru Besar IPDN Prof. Dr. Djohermansyah Johan, M.A., serta Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa para peserta menyampaikan bahwa keberhasilan peserta dalam menyelenggarakan seminar pada hakikatnya merupakan indikator peserta dalam menyerap dan memahami berbagai materi selama mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. “Para peserta telah menuangkan ilmu dan pengetahuannya dalam seminar yang strategis, dengan menggunakan cara berpikir yang utuh,



menyeluruh, dan terpadu, khususnya mengenai penataan partai politik untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia,” kata Gubernur Lemhannas RI di hadapan para peserta.

Agus Widjojo kemudian menyebutkan bahwa berdasarkan hasil sementara seminar yang telah dirumuskan, dapat disimpulkan bahwa penataan partai politik dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia belum menunjukkan penguatan yang optimal. “Legitimasi presiden yang seharusnya menjadi modal bagi presiden terpilih kerap tersandera saat mengadakan proses politik di tingkat partai. Upaya membangun koalisi pun tidak dapat dihindari, akan tetapi koalisi tersebut cenderung pragmatis. Menurut penilaian saya, para peserta telah merumuskan hasil yang pantas dikedepankan dan

merupakan pemikiran yang faktual, komprehensif, dan integral,” kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di hadapan para peserta. Melalui seminar tersebut, diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah dalam melakukan penataan partai politik untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo Kumolo menyampaikan, ada tiga kunci kesuksesan Pilkada, yaitu pertama partisipasi politik masyarakat, kedua tolak politik uang (tidak ada *money politics*), dan ketiga kampanye ide, gagasan, dan program. “Para peserta pemilihan diharapkan tidak lagi mengangkat isu yang terkait dengan SARA, hoax, atau yang terkait dengan menyebar kebencian,” kata Tjahjo. (END)



Pada Peringatan 73 Tahun Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2018, Lemhannas RI mengadakan Upacara Peringatan Upacara Hari Kemerdekaan ke-73 di Lapangan Tengah Lemhannas RI, Jumat (17/8). Upacara tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh Pejabat serta Staf Lemhannas RI.

Karsiyanto menyampaikan amanat Gubernur Lemhannas RI, “Selama 73 tahun merdeka, Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai dinamika setiap era kepemimpinan nasional. Bangsa Indonesia juga terus membuktikan eksistensi bangsa ini untuk selalu berkomitmen menjadi satu identitas bangsa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Karsiyanto juga menambahkan bahwa slogan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia kali ini “Kerja

Kita Prestasi Bangsa” merupakan representasi Bangsa Indonesia untuk bekerja sesuai peran dan fungsinya masing-masing. “Dengan demikian, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia kali ini memiliki slogan ‘Kerja Kita Prestasi Bangsa’. Slogan ini pada hakikatnya merupakan representasi Bangsa Indonesia untuk bekerja sesuai peran dan fungsinya masing-masing setiap warga negara dan pada gilirannya akan bermuara pada capaian dan prestasi Bangsa Indonesia,” kata Karsiyanto di hadapan para peserta upacara.

Terkait dengan peran dan fungsi Lemhannas RI dalam kaitannya dengan tema dan slogan Hari Kemerdekaan ke-73 Tahun, Lemhannas RI diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif dan konstruktif bagi bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan demi pembangunan nasional yang adil dan merata sehingga dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.



Arundati Shinta
Peserta PPRA 58 Lemhannas 2018

Belajar Tidak Rakus di Asrama Lemhannas dan Hubungannya dengan Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi

Sekitar Juli-Agustus 2018 lalu, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan berceramah di Lemhannas Jakarta. Petuahnya sederhana namun sulit diikuti yaitu “Jangan rakus!”. Petuah itu ditujukan pada ratusan perwira TNI, Polri dan sipil calon pemimpin nasional. Meskipun ceramahnya bertema ekonomi Indonesia secara makro, namun perilaku individu secara mikro dalam kehidupan sehari-hari tetap berpengaruh terhadap perekonomian. Petuahnya itu seperti meneror saya, karena

selama ini saya bersifat rakus pada makanan. Apalagi saya sekarang hidup di Asrama Lemhannas yang penataan makanan serba dibatasi. Apa hubungan antara perilaku rakus dengan ketahanan nasional bidang ekonomi? Ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Negara akan menjadi aman dan sejahtera bila kebutuhan perut masyarakatnya terpenuhi. Situasi tersebut pada hakekatnya ketahanan ekonomi nasional menjadi kuat. Ketahanan ekonomi nasional dapat tercapai, bila masyarakat tidak

menghabiskan sumber daya yang ada secara sia-sia.

Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak rakus? Hal ini sangat sulit, karena kita mempunyai kecenderungan untuk rakus. Kita cenderung mengumpulkan barang dengan berlebih-lebihan meskipun di rumah barang serupa sudah tersedia. Ini sesuai dengan pengertian sifat rakus yaitu kecenderungan untuk memiliki barang-barang, menguasai orang-orang, status, perhatian dan apresiasi secara berlebihan. Ukurannya adalah melebihi dari standar lazim kenyamanan

seseorang. Contohnya, standar lazim untuk makan adalah sehari tiga kali. Bila seseorang mengumpulkan banyak makanan sehingga ia bisa makan sehari lebih dari tiga kali, maka ia orang yang rakus.

Mengapa seseorang bersifat rakus? Kerakusan merupakan hasil dari rasa tidak puas dan rasa kosong. Untuk mengisi rasa kosong itu, individu mengumpulkan sumber-sumber, mencari perhatian dan kekuasaan secara berlebih-lebihan. Bahkan upaya tersebut dilakukan dengan mengorbankan kebahagiaan orang lain (D'Souza, 2015). Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah merebut jatah makanan orang lain, sehingga orang lain kelaparan.

Dampak kerakusan adalah munculnya fenomena sosial antara lain anak-anak yang obesitas, penimbunan sembako secara ilegal, perselingkuhan, hubungan sosial antar tetangga yang memburuk, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, pembunuhan, perkosaan, dan kejahatan lainnya. Pada level global, maka kerakusan akan memunculkan kesengsaraan rakyat antara lain perang, penjajahan, pembantaian, kemiskinan akut, kegoncangan sosial, meledaknya jumlah penduduk, perubahan iklim, dan krisis ekonomi (D'Souza, 2015). Bila masyarakat banyak yang rakus, maka ketahanan nasional pun bisa terancam. Jadi pada intinya sifat rakus akan menyebabkan pihak-pihak lain mulai dari level keluarga sampai dengan global akan mengalami kesengsaraan.

Apakah ada cara untuk menyembuhkan sifat rakus ini? Pada tataran komunitas, maka resep D'Souza antara lain pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, pajak progresif, pensiun, serikat kerja yang kuat, jaminan sosial bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan, pemberantasan korupsi, dan banyaknya PNS. Saran D'Souza tersebut berupa suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, perubahan sifat rakus harus datang dari dalam individu sendiri.

Pengubahan diri ini sangat sulit. Banyak orang gagal dalam usaha memperbaiki diri dengan mengandalkan regulasi diri internal. Cara jitu untuk mengurangi sifat rakus adalah dengan hidup di asrama. Hidup di asrama sangat tidak mudah, karena segala sesuatu serba terbatas. Pembatasan itu mulai dari porsi makanan yang boleh diambil, jadwal makan yang tertentu, aliran listrik, jumlah air untuk mandi, bahkan juga jadwal menonton televisi. Adanya pembatasan itulah yang bisa 'mendidik' orang untuk menahan sifat rakusnya.

Berikut adalah pengalaman hidup di asrama Lemhannas RI Jakarta, yang segala sesuatu tidak bisa senyaman kehidupan di rumah. Pengalaman pahit yang saya alami adalah habisnya lauk kesukaan saya, karena sudah dikonsumsi oleh peserta teman-teman PPRA 58 Lemhannas. Saya hanya bisa makan nasi dengan kuah saja. Pada kesempatan lain, saya 'membalas dendam' dengan mengambil lauk yang sangat banyak. Oleh karena perut saya memang kecil, maka lauk yang ada di piring tersisa banyak dan harus terbuang begitu saja. Apa peduli saya dengan kawan lain yang kehabisan makanan?

Beberapa hari berikutnya, seorang teman dari Kepolisian bercerita tentang kehidupan polisi di asrama. Acara makan taruna dan pimpinannya harus dilaksanakan bersama-sama. Jumlah lauk sudah dihitung persis sama dengan jumlah taruna dan pemimpin. Bila ada taruna yang rakus, maka akan terlihat jelas. Ia akan mendapatkan sanksi sosial. Berkat prosedur yang ketat itu, maka teman saya menjadi tidak rakus. Ia makanan sesuai dengan kebutuhannya.

Setelah mendengar kisah inspiratif dari teman polisi tersebut dan ditambah nasehat dari Menteri

Luhut, saya menjadi tercenung. Akhirnya saya mulai membatasi porsi makanan saya. Begitu mudahkan sifat rakus saya hilang? Ternyata tidak. Godaan kembali datang ketika peserta PPRA 58 banyak yang kembali ke daerah, sehingga jumlah makanan di asrama berlimpah ruah. Bila saya makan berlebih-lebihan, tidak ada yang dirugikan. Bahkan seorang teman mendorong saya untuk membawa ekstra makanan untuk dibawa ke kamar.

Saya menjadi ragu, haruskah saya kembali rakus terhadap makanan meskipun tidak ada orang yang dirugikan? Jawabannya adalah tidak. Saya tidak boleh berperilaku rakus lagi. Perkara makanan yang berlimpah ruah tersebut adalah bukan urusan saya, tetapi urusan pihak catering. Mungkin saja pihak catering akan memberikan sebagian makanan itu pada Satpam, atau orang-orang lainnya yang membutuhkan. Hal yang paling penting adalah regulasi internal saya tentang perilaku rakus menjadi terbentuk. Saya cenderung makan sesuai kebutuhan, meskipun jumlah makanan berlimpah ruah dan meskipun tidak ada orang yang mengawasi saya. Semoga regulasi diri internal saya tersebut dapat menular pada perilaku-perilaku buruk saya yang lain.

Kehidupan asrama Lemhannas RI tentunya melahirkan tantangan tersendiri bagi para peserta pendidikan untuk dapat "meregulasi diri". Dengan begitu di masa depan, sebagai suri teladan diharapkan dapat memberikan contoh dan cerminan yang baik bagi masyarakat, tentunya para calon pimpinan bangsa dapat memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ekonomi.

Audiensi iNews TV bersama Gubernur Lemhannas RI

iNews TV melakukan audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Senin (30/9).



Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik sebanyak 25 Pejabat Eselon I,II,III,IV di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Selain itu, tiga pejabat eselon I dan II juga melepas masa baktinya pada Rabu (4/7).



Lemhannas RI Selenggarakan Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Angkatan I

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Angkatan I di Ruang Pancasila Gedung Trigatra Lemhannas RI (30/7). Kegiatan diawali dengan laporan dari Kedeputan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.



Peringati Hari Raya Idul Adha, Lemhannas RI Lakukan Penyembelihan Hewan Qurban.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka acara penyembelihan hewan kurban pada Kamis (23/8) dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Rabu (22/8). Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan pematongan hewan kurban dan pembagian hewan kurban bagi masyarakat yang membutuhkan.

Gubernur Lemhannas RI Menghadiri Simposium Nasional DPR RI - BPIP

Simposium bertema “Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan” tersebut digelar pada 30 Juli – 1 Agustus 2018 di Jakarta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan pemikiran dan pandangan dari berbagai narasumber untuk mengetahui apakah selama ini nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.



Upacara Bendera Bulanan Juli 2018

Setiap bulan tepatnya di tanggal 17, seluruh personel Lemhannas RI mengikuti upacara bendera yang kali ini bertugas sebagai Inspektur Upacara adalah Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi Lemhannas RI, Mayjen TNI Ivan Ronald Pelealu, S.E. M.M., di Lapangan Tengah Lemhannas RI, (17/7) pagi. Ivan menyampaikan amanat gubernur terkait partisipasi rakyat Indonesia pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah yakni di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.





Konsultasi Konseling Gubernur dan PPRA LVII

Para Peserta PPRA 57 melakukan konseling dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Jumat (24/07) di ruang makan lantai 3 Gedung Pancagatra Lemhannas RI.



Sosialisasi UU ITE di Lemhannas RI

Lemhannas RI selenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada seluruh personil pada Senin (6/8), di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI. Hadir sebagai narasumber, adalah Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Y.B. Susilo Wibowo, S.E., M.M., dan Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Ditjen Aptika Kemenkominfo, Teguh Arifyadi, M.H.



Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Kunjungi Lemhannas RI

Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) mengunjungi Lemhannas RI untuk melakukan audiensi, Senin (3/9) dan diterima oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI. ISMKI bergerak di bidang pengabdian masyarakat, advokasi, pendidikan profesi dan pengembangan kepemimpinan. Bidang-bidang tersebut dinilai sebagai bidang yang berkaitan dengan mahasiswa.



Selamat dan
Sukses
atas
terselenggaranya



18th ASIAN GAMES
**Jakarta
Palembang
2018**



31 Atlet Indonesia
Peraih Medali Emas
di Asian Games 2018





Back Cover

